

**BUKU PEDOMAN KADERISASI
KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA
JILID II**

**MATERI
MASA PERKENALAN ANGGOTA BARU (MPAB)**



**DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PIMPINAN PUSAT
KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA
2001**

MATERI MPAB

1. Perkenalan dengan Weda dan Panca Sradha

Disusun oleh : Made Surya Putra, Ketua Dept Litbang PP KMHDI 1999-2002

Pengantar

Salah satu kewajiban pokok anggota KMHDI, selain Dharma Negara adalah Dharma Agama. Dalam pengertian ini, seorang anggota KMHDI harus selalu berusaha untuk memberikan kontribusinya bagi agamanya. Kewajiban ini timbul karena organisasi KMHDI adalah sebuah organisasi yang berbasis agama Hindu. Untuk berkontribusi bagi agamanya, seorang kader tentunya terlebih dahulu harus menguasai konsep-konsep penting dan mendasar tentang Hindu.

Pada jamannya, Hindu pernah berkembang menjadi sebuah agama yang begitu agung. Dalam jaman keemasan ini, telah lahir jenius-jenius lokal di berbagai daerah yang dengan berhasil melakukan reinterpretasi dan penerjemahan berbagai kitab agama Hindu dalam lingkup ruang lokal. Kemampuan ini timbul karena penguasaan jenius-jenius lokal terhadap konsep-konsep dasar Hindu. Penguasaan atas konsep-konsep yang paling mendasar dalam agama Hindu adalah sangat penting karena konsep-konsep inilah yang akan menjiwai praktek keagamaan yang dijalankan sehari-hari. Kelemahan penguasaan teori-teori dasar Hindu akan melemahkan kemampuan tumbuh dan berkembangnya komunitas Hindu.

Tidak dapat disangsikan bahwa manusia Hindu Indonesia umumnya adalah orang-orang yang sangat menguasai praktek keagamaan, namun disangsikan apakah penguasaan dalam kualitas yang sama juga dimiliki dalam konsep-konsep dasar Hindu. Kesalahan inilah yang telah menjerumuskan komunitas Hindu Indonesia dalam jaman kegelapan. Harus disadari oleh setiap manusia Hindu yang berdomisili di Indonesia, bahwa penguasaan atas konsep-konsep dasar Hindu akan menimbulkan determinasi jiwa yang lebih besar dibandingkan dengan hanya menguasai praktek keagamaan yang sangat terikat pada ruang dan waktu.

Setelah feodalisme berkembang dalam Hindu dan penguasaan teori-teori dasar dimonopoli oleh sekelompok elit umat, maka Hindu memasuki jaman gelap. Kebenaran agama telah dimonopoli oleh sekelompok elit umat. Kesalahan utama bukan terletak pada elit agama tersebut, namun justru terletak pada golongan besar komunitas Hindu yang telah membiarkan praktek monopoli kebenaran tersebut berlangsung selama berabad-abad.

Tanpa menafikan kekuatan nilai ajaran praktis yang diteruskan melalui metode lisan, adalah sebuah kebutuhan mendesak untuk melakukan suatu pengajaran teori-teori dasar Hindu pada kader-kader muda Hindu khususnya yang ada di KMHDI. Sebuah lahan telah diciptakan dalam mekanisme organisasi KMHDI, yaitu melalui kaderisasi. Dalam tahap kaderisasi yang paling awal, KMHDI berkewajiban untuk mengindoktrinasi konsep-konsep dasar Hindu yang terdapat di Weda dan Panca Sradha bagi para kadernya.

Teologi dalam Hindu, telah termuat dalam kitab suci Weda, yang kemudian bagi komunitas Hindu Indonesia, dicakup dalam konsep Panca Sradha. Dua struktur dasar Hindu ini, akan menimbulkan implikasi praktis yang luas ketika dilakukan pembahasan atas masing-masing bagiannya. Untuk itu, tulisan ini hanya akan membicarakan tentang konsep-konsep dasar dan tidak akan membicarakan mengenai implikasi praktis yang berada pada dimensi ruang dan waktu karena terbatasnya waktu untuk pelaksanaan MPAB. Pembahasan yang lebih luas, diharapkan dapat dilakukan di kaderisasi tahap I.

Perkenalan dengan Weda

Monopoli pengajaran weda yang telah dilakukan oleh para leluhur kita di Indonesia telah mengakibatkan suatu kondisi pembodohan yang luar biasa. Seorang peneliti orientalis, Sylvain Levi menyatakan bahwa “Apa yang oleh para pedanda di Bali disebut dengan Catur Weda adalah 4 bait dari Narayana Upanisad yang pada akhir tiap-tiap bagian berisi kata sirah, sehingga sering disebut dengan Catur Weda Sirah”. Rangkaian mantram tersebut pada bentuk asalnya bernama “narayanatharvasiropanisad” yang aslinya terdiri dari 5 bait mantram, namun di Bali hanya diketahui sebanyak 4 bait yaitu “etad Rgveda siro dhite, etad Yajurveda siro dhite, etad Samaveda siro dhite, etad Atharvaveda siro dhite”

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada tahun 1849 oleh seorang sarjana Belanda, R. Freiderich, ditulis tentang keberadaan veda di pulau Bali. Ia memberikan gambaran bahwa para pandita memiliki manuscript yang sangat penting dan dirahasiakan. Menurutnyanya, tanpa sempat melihat langsung, manuscript tersebut adalah 4 buah samhita yang ditulis oleh Bhagawan Byasa. Namun setelah penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Brumund dan Kern, ditemukan bahwa yang disebut Veda tersebut adalah mantram-mantram berbahasa sansekerta yang bercampur dengan bahasa Jawa Kuno, yang berisikan mantram ritual beserta penjelasannya yang bersifat mistis dengan latar belakang Saivisme dengan warna Tantrik.

*Yathemam vacam kalyanim avadani janebyah
Brahma rajanyabhyam sudraya caryaya
Ca svaya caranaya ca*

Yajurveda XXVI.2

Hendaknya disampaikan sabda suci ini kepada seluruh umat manusia, cendikiawan-rohaniawan, raja-pemerintah-masyarakat, para pedagang-petani-nelayan-buruh, kepada orang-orangku dan kepada orang asing sekalipun.

Weda bukanlah sebuah kitab suci yang menakutkan, atau sebuah kitab suci yang akan menyebabkan hal-hal yang buruk bagi pembacanya. Weda adalah sebuah buku tentang pengetahuan teologis, Filosofis, ritual dan banyak lagi lainnya. Yajurveda sendiri telah mengatakan bahwa ajaran weda harus disampaikan dan bukannya disimpan atau dimonopoli kebenarannya oleh hanya satu golongan.

Kata Veda dapat dikaji dari 2 pendekatan yaitu etimologi dan semantik. Kata veda berasal dari urat kata kerja Vid yang berarti “mengetahui” dan Veda yang berarti “pengetahuan”. Dalam pengertian semantik, Veda berarti pengetahuan suci, kebenaran sejati, kebijakan tertinggi atau pengetahuan spritual sejati tentang kebenaran abadi. Sebagai sebuah sumber pengetahuan, Veda telah eksis jauh sebelum dimulainya hitungan tahun masehi. Maurice Winternitz dalam bukunya A History of Indian Literature Vol 1, (1927) mengatakan bahwa Veda adalah pustaka monumental tertua Indo-Eropa. Demikian pula menurut Bloomfield, dalam bukunya The Religion of Veda, yang mengatakan bahwa susastra Veda jauh lebih tua dibandingkan dengan sastra Yunani ataupun Israel.

Sastra veda menggunakan bahasa sansekerta. Pada awalnya nama bahasa “Sansekerta” ini dipopulerkan oleh Maharsi Panini, yang selain menggunakan nama bahasa Sansekerta, juga menyebut bahasa Weda dengan “daivivak”, yang artinya bahasa dewata. Beberapa tahun berikutnya, Maharsi Patanjali menulis buku kritik terhadap karya Maharsi Panini yang makin menyempurnakan bahasa sansekerta. Seorang penulis lainnya adalah Katyayana, yang di Indonesia dikenal dengan nama Rsi Wararuci dengan salah satu kitabnya yang telah diterjemahkan di Indonesia yaitu Saracamuccaya.

Setelah melalui perjalanan yang demikian panjang, bahasa Sansekerta kemudian mengalami beberapa perubahan mendasar, dimana telah timbul sub-sub bahasa Sansekerta. Ada tiga jenis bahasa Sansekerta yang dikenal saat ini.

1. Sansekerta Weda, (Vedic Sanskrit) yaitu bahasa Sansekerta yang digunakan dalam Weda

2. Sansekerta Klasik, (Classical Sanskrit) yaitu bahasa sansekerta yang digunakan dalam kitab-kitab Hindu yang berusia lebih muda dari Weda seperti Itihasa, Purana, Smrti dan lain sebagainya.
3. Sansekerta Campuran (Hybrid Sanskrit), adalah bahasa sansekerta yang telah mendapat pengaruh yang kuat dari bahasa-bahasa lokal. Di Indonesia dan Asia Tenggara, berkembang bahasa Sansekerta Kepulauan (Archipelago Sanskrit) yang banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu.

Penelitian terhadap bahasa Sansekerta sebenarnya telah dilakukan lama sebelumnya. Pada awal abad XVII di Eropa telah dimulai usaha-usaha untuk mempelajari Bahasa Sansekerta, dengan motif Zending ajaran Kristen dan Katolik. Beberapa diantara mereka adalah Dr. Max Muller, Weber, Sir William Jones, HT. Colebrooke dan banyak lagi yang lain. Yang memprihatinkan, tidak ada satupun diantara penelitian tersebut yang ditujukan untuk mengembangkan Hindu.

Dalam seluruh sastra Hindu, Weda menempati posisi yang tertinggi. Diyakini demikian karena hanya Weda yang diwahyukan sejak mulai adanya pengertian waktu. Dari weda kemudian mengalir kepada buku-buku yang lain. Terhadap pengertian ini, Swami Dayananda Saraswati mengatakan, Rgveda, Yajurveda, Samaveda dan Atharwaveda adalah sabda dari Tuhan. Acuan dari pemikiran ini adalah

*Tasmad Yajnat sarvahuta
Rcah samani jajnire
Chandami jajnire tasmad
Yajus tasmad ajayata*

Yajurveda XXX.7

Dari Tuhan Yang Maha Agung dan kepadanya umat manusia mempersembahkan berbagai yadnya dan daripadanya muncul Rgveda dan Sama veda. Daripadanya muncul yajurveda dan Samaveda.

Dalam proses pewahyuan Weda tersebut, ada beberapa cara yang dikenal, diantaranya adalah :

1. Svaranada, gema yang diterima oleh para Rsi yang kemudian menjadi sadba Tuhan yang kemudian disampaikan kepada murid-muridnya.
2. Upanisad, pikiran para Rsi dimasuki oleh sabda Brahman dan berfungsi sebagai penghubung dalam kondisi pendidikan "Param-para"
3. Darsana atau Darsanam, dimana para Rsi berhadapan secara rohani dalam suatu situasi gaib yang bersifat spiritual.
4. Avatara, yakni manusia yang berhadapan dengan awataranya, seperti Arjuna dengan Sri Krsna dalam Bhagavadgita

Weda memiliki beberapa nama lain, diantaranya adalah :

1. Kitab Sruti, yang menunjukkan bahwa weda adalah kitab wahyu
2. Kitab Catur Veda, yang menunjukkan bahwa Weda adalah kitab yang merupakan himpunan (Samhita) dari Rgveda, Yajurveda, Samaveda dan Atharvaveda. Bila dilihat dari isinya sesungguhnya weda dapat dibagi atas dua jenis yaitu Rg dan Atharva, karena Yajur dan Samaveda isinya berasal dari Rg.
3. Kitab Rahasya, yang artinya weda mengandung ajaran yang bersifat rahasia. Rahasia disini mengandung pengertian ajaran ketuhanan tentang penciptaan, moksa dan lain-lain.
4. Kitab Agama, yang berarti bahwa kebenaran yang dikandung weda adalah mutlak dan harus diyakini kebenarannya.
5. Kitab Mantra, nama ini dinerikan karena weda memang berbentuk himpunan mantra dan kidung.

Weda sendiri memiliki beberapa karakteristik yaitu :

1. Weda tidak berawal, karena merupakan sabda Tuhan, sehingga telah ada sebelum alam diciptakan
2. Weda tidak berakhir, karena berlaku sepanjang jaman

3. Veda Apauruseyam, yang artinya tidak disusun oleh manusia biasa

Perlu ditegaskan disini bahwa weda pada awalnya diterima secara lisan, dan diteruskan juga secara lisan. Proses penyusunan kitab weda dalam bahasa literer, dimulai oleh Krsnadvapayana atau dikenal juga dengan nama Maharsi Vyasa. Beliau dibantu oleh 4 orang siswanya yaitu Pulaha atau Paila yang diyakini menyusun Rgveda, Vaisampayana yang menyusun Yajurveda, Jaimini yang menyusun Samaveda dan Sumantu yang menyusun Atharvaveda.

Sedangkan rsi-rsi yang dihubungkan dengan proses pewahyuan weda pada awalnya dikenal dengan kelompok Saptarsi. Adapun saptarsi dan gotra sapta rsi yang paling banyak disebut dalam proses ini adalah :

1. Rsi Grtsamada, yang banyak disebut dalam hubungannya dengan turunya wahtu-wahyu pada Rgveda Mandala II.
2. Rsi Visvamitra, yang dikaitkan dengan seluruh Mandala III Rgveda.
3. Rsi Vamadeva, yang dikaitkan dengan Mandala IV Rgveda
4. Rsi Atri, yang berhubungan dengan Mandala V Rgveda. Dalam keluarga (Gotra) Rsi Atri disebut bahwa terdapat 36 orang penerima wahyu.
5. Rsi Bharadvaja, yang banyak dikaitkan dengan turunnya Mandala VI Rgveda, kecuali beberapa bagian yang berhubungan dengan nama Sahotra dan Sarahotra.
6. Rsi Vasistha, yang bayak berhubungan dengan Mandala VII Rgveda. Dalam kisah Mahabrata, rsi ini juga sering disamakan dengan Rsi Visvamitra.
7. Rsi Kanva, yang merupakan nama pribadi dan nama keluarga yang banyak dikaitkan dengan mandala VIII Rgveda. Adapun mandala IX dan X adalah kumpulan wahyu yang diterima oleh beberapa Rsi yang lain. Mandala X adalah yang paling lengkap.

Weda yang dituliskan dalam bahasa sansekerta, memiliki suatu bentuk yang khusus dalam penulisannya. Bentuk penulisan kidung weda disebut dengan Chanda. Ini adalah suatu istilah yang sama dengan metrum (Wirama) yaitu suatu aturan tentang jumlah suku kata di dalam sebuah baris dan sebuah mantram Weda. Jumlah suku kata yang dihitung adalah suku kata yang konsonannya diikuti huruf svra (Vowel) termasuk pula huruf aspirat (visarga = h) dan suara sengau (anusvasra = m). Baris mantram weda juga ditentukan oleh irama berat ringan dan panjang pendek yang disebut Guru dan Laghu. Secara tradisonal, metrum-metrum tersebut dibedakan atas 2 jenis yaitu yang biasa dan yang yang panjang.

Yang biasa :

| | Jml Suku Kata |
|------------------|------------------|
| 1. Gayatri..... | 24 (8+8+8) |
| 2. Usnih..... | 28 (7+7+7+7) |
| 3. Anustubh..... | 32 (8+8+8+8) |
| 4. Brhati..... | 36 (9+9+9+9) |
| 5. Pankti..... | 40 (8+8+8+8+8) |
| 6. Tristubh..... | 44 (11+11+11+11) |
| 7. Jagati..... | 48 (12+12+12+12) |

Yang panjang :

| | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Atijagati..... | 52 (12+12+12+8+8) |
| 2. Sakvari..... | 56 (8+8+8+8+8+8+8) |
| 3. Atisakvari..... | 60 (16+16+12+8+8) |
| 4. Asti..... | 64 (16+16+16+8+8) |
| 5. Atyasti..... | 68 (12+12+8+8+8+12+8) |
| 6. Dhrti..... | 72 (12+12+8+8+8+16+8) |
| 7. Atidhrti..... | 76 (12+12+8+8+8+12+8+8) |

Selain metrum-metrum yang standar, weda juda mengenal berbagai variasi dari metrum tersebut. Penjelasan mengenai hal ini akan sangat panjang, akan lebih baik apabila pembaca membaca buku I Made Titib, Veda Sabda suci. Isi Veda sangat beragam, namun pada dasarnya Veda membicarakan pengetahuan yang bersifat sangat mendasar.

*Ko addha veda ka iha pra vocat
Kuta ajata kuta iyam visrstih
Arvag deva asyavisarjanenatha
Ko veda yatha abhuva*

Rgveda X.129.6

Siapakah sesungguhnya mengetahui, siapakah yang mampu menjelaskan, dimanakah ia lahir dan darimanakah ciptaan itu berasal ?. Sesungguhnya para dewata belakangan dari terciptanya alam ini. Siapakah yang mengetahui asal dari ciptaan ini

Veda membicarakan tentang konsep ketuhanan, yang dalam bahasa veda adalah deva atau devata. Pengertian “deva atau devata” disini tidak sama dengan pengertian “dewa” dalam bahasa Indonesia. Swami Dayananda Sarasvati mengatakan arti atau makna kata dewa itu melingkupi dua makna yang sama. Perbedaan antara Dewa (Tuhan) dengan Deva (para Deva) adalah, seluruh dewa atau devata menerima sinar dari Tuhan, sedangkan Tuhan memancarkan sinarnya sendiri. Beraneka dewa dalam Hindu itu adalah untuk memudahkan membayangkan Tuhan dalam berbagai manifestasinya. Mengenai Keesaan Tuhan, Yajurveda mengatakan :

*Yo ‘asav aditye purusah
So asav aham. Om Kham Brahma*

Yajurveda XI.17

Spirit yang terdapat di matahari itu adalah Aku. Om (nama-Ku) memenuhi seluruh alam semesta.

Tentu timbul sebuah pertanyaan, berapakah dewa yang ada dalam weda. Kitab Rgveda dan Atharvaveda menyebut 33 dewa yang merupakan manifestasi dari Tuhan. Ke-33 dewa tersebut, adalah 8 Vasu, 11 Rudra, 12 Aditya dan ditambah dengan Indra serta Prajapati.

*Yasya trayastrimsad deva ange sarva samahitah
Skambham tam bruhi katamah videva sah*

Atharvaveda X.7.23

Siapakah yang sedemikian banyak itu, ceritakan kepadaku, tidak lain adalah Tuhan yang meresapi segalanya, yang pada dirinya dikandung seluruh 33 dewa sebagai kekuatan alam.

Bila kita membaca lebih lanjut mantram lainnya dari Rgveda, maka kita akan mengetahui bahwa jumlah dewa dalam Veda tidaklah hanya 33, namun sebanyak 3339. hal ini dijelaskan oleh Rgveda

*Trini sata tri sahasranyagnim trimsancca
Deva nava casaparyan auksan ghrtairastrnan
Barhirasma adiddhotaram nyasadyanta*

Rgveda III. 9.9

Adalah tiga ribu tiga dewa, tiga puluh sembilan dewata yang memuja agni (Tuhan). Yang telah menyebarkan rumput suci dengan minyak yang dicipratkan dan mengangkat mereka sebagai pandita dan pelaksana yadnya.

Diantara dewa-dewa tersebut, Rgveda menggambarkan Surya sebagai dewa yang tertinggi dengan mantram.

*Udvayam tamasaspari jyotis pasyanta uttaram
Devam devatra suryamaganma jyotiuttamam*

Rgveda I.50.10

Lihatlah menjulang tinggi diangkasa, cahaya yang terang benderang mengatasi kegelapan telah datang. Ia adalah Surya, dewa dari seluruh dewa, cahayanya yang terang itu betapa indahnya.

Surya yang dimaksud disini bukanlah “Surya Bola Matahari” namun devata tertinggi. Didalam veda, dewa pada dasarnya adalah nama lain atau bentuk lain dari Surya (Tuhan), dan devi adalah aspek feminim dari devata. Kata “Devi” mengandung makna fajar di pagi hari. Dewa dan dewi dalam weda sering digambarkan secara Anthrophomorphic (berwujud seperti manusia dengan beraneka keunggulan dan kelebihannya, yang disertai dengan kendaraan dan binatang-binatang yang menarik kendaraan tersebut). Dalam praktek persembahyangan hanya beberapa dewa yang secara umum dipuja, hal ini adalah karena pada jaman Upanisad, telah terjadi peralihan fungsi dari sedemikian banyak dewa menuju bentuk Trimurti sebagaimana yang dikenal pada saat ini. Didalam konsep Trimurti yang paling banyak dipuja adalah Brahma, Visnu dan Siva.

Dalam pembahasan model-model dewa yang ada diatas, dapat diketahui bahwa veda menganut konsep Monisme atau sebagaimana yang dikatakan oleh David Frawley, “Satu dalam segalanya dan segalanya dalam yang satu”. Namun harus dikritisi pula bahwa selain menganut Monisme, weda juga menganut Monotheisme Transcendent dan Monotheisme Immanent. Penjelasan mengenai tiga istilah tersebut akan dijelaskan dibawah ini, disertai dengan berbagai model teologi lain yang tidak dianut oleh weda.

1. Animisme, keyakinan akan adanya roh, dan segala sesuatu didiami dan dikuasai oleh roh yang berbeda-beda.
2. Dinamisme, keyakinan akan adanya kekuatan alam, kekuatan ini dapat berupa personal atau non personal.
3. Totemisme, keyakinan akan adanya binatang keramat yang sangat dihormati.
4. Polytheisme, keyakinan akan adanya banyak Tuhan.
5. Natural Polytheisme, keyakinan akan adanya banyak Tuhan yang menjadi penguasa atas segala aspek alam.
6. Henotheisme atau Kathenoisme, Max Muller mengemukakan hal ini ketika mempelajari weda. Ini adalah suatu model keyakinan terhadap terjadinya pergantian kekuasaan tertinggi diantara dewa-dewa.
7. Pantheisme, keyakinan bahwa dimana-mana dan apapun adalah Tuhan.
8. Monotheisme, keyakinan akan adanya satu Tuhan
 - a. Monotheisme Transcendent, keyakinan yang memandang Tuhan jauh dari ciptaannya, diluar dari ciptaannya
 - b. Monotheisme Immanent, keyakinan yang memandang Tuhan sebagai penguasa tertinggi berada diluar ciptaannya sekaligus berada didalam ciptaannya
9. Monisme, keyakinan akan adanya Tuhan yang merupakan hakekat alam, dan segala hal berada didalam-Nya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, teologi weda adalah Monisme, Monotheisme Transcendent dan Monotheisme Immanent. Dalam pandangan Monotheisme Transcendent, Tuhan selalu muncul dalam bentuk Personal sedangkan dalam model Monotheisme Immanent, Tuhan digambarkan sebagai Impersonal God. Selain membahas tentang konsep ketuhanan, weda juga membahas beberapa hal lain yang oleh Maurice Winternitz dikategorikan sebagai berikut.

1. Samhita, yaitu mantra weda yang mengandung mantra Upasana, ajaran filsafat, tata susila, pendidikan dan lain-lain
2. Brahmana, yakni uraian panjang mengenai teologi, terutama observasi tentang jalannya upacara yadnya.
3. Aranyaka dan Upanisad, terkandung ajaran mengenai filsafat Hindu dan meditasi.

Selain kitab-kitab Sruti diatas, dikenal juga Wedangga, Upaweda, Upangaweda, Smrti, Dharmasastra, Itihasa, Purana, Agama, Tantra dan Darsana. Semua kitab yang lain tersebut adalah bagian penjelas atau pelengkap dari kitab-kitab Sruti yang mampu menjelaskan dengan lebih komprehensif isi dari kitab sruti.

Masih cukup banyak aspek dari Weda yang belum dibahas dalam tulisan ini, namun demikian diharapkan penjelasan yang sedikit ini mampu menggugah kader-kader KMHDI untuk terus menggali ajaran-ajaran Hindu. Pembahasan berikutnya adalah mengenai Panca Sradha.

Panca Sradha

Asal kata dan pengertian. Secara estimologi kata sradha berasal dari akar kata “srat” atau “srad” yang berarti hati, disambung dengan kata “dha” yang artinya meletakkan. Sehingga arti keseluruhan adalah meletakkan hati seseorang pada sesuatu. Ada pula yang mengartikan “srat” sebagai kebenaran (Yaskarya : Niganthu), dan sradha adalah sikap pikiran yang didasarkan pada kebenaran.

Interpretasi yang lain dari Prof. DR. K.L. Seshagiri Rao dari Universitas Punjab adalah

1. Kerinduan akan suatu tujuan akhir.
 2. Percaya akan adanya suatu “sarana” dalam pencapaian tujuan tersebut.
- Kedua Rumusan ini akan digunakan sebagai dasar pembahasan.

Dalam kitab-kitab Brahmana. Tujuan manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di surga. Jalan terbaik untuk mewujudkannya adalah dengan yadnya. Digunakan sistem perantara dalam pemujaan yadnya dengan menggunakan mantra-mantra pendeta. Digunakan sistem timbal balik daksina atas jasa-jasa pendeta. Tidak dikenal sistem pengekangan moral bagi umat karena doktrin upacara yadnya dan peran pendeta yang hegemonik. Sifat pelaksanaan upacara adalah formal, eksternal dan impersonal.

Dalam kitab-kitab Upanisad. Tujuan akhir umat adalah moksa. Sarana pencapaian adalah perenungan, meditasi, yoga dengan bimbingan guru yang Brahmanistha. Pengorbanan yang dilakukan adalah pengorbanan ke”aku”an dari unsur diri yang paling dalam. Bentuk ritual adalah tapa (pengekangan diri dan kesederhanaan) serta prasadha (anugrah tuhan).

Dalam kitab Bhagawadgita. Tujuan tertinggi adalah manunggal dengan Tuhan, saat hidup maupun saat telah meninggalkan badan jasmani. Sarana pencapaian adalah dengan Niskamakarma Yoga yaitu pelaksanaan kewajiban tanpa pamrih, tanpa keakuan, dengan cinta kasih, bhakti dan pasrah pada tuhan. Selain konsep diri yang imanen, juga dikenal konsep diri yang transendental.

1. Brahman

Brahma jainanam prathanam purastat

Atharvaveda IV.1.1

Tuhan adalah yang pertama dari yang ada di alam semesta.

Asal kata dan pengertian. Akar kata “brh” yang berarti menjadi besar dan kuat. Kata ini kemudian berevolusi dan berkembang sehingga menjadi beberapa arti, seperti roh universal tunggal, yang mutlak, yang abadi dll. Sebagai puncaknya adalah adanya pengakuan akan ke-esa-an tuhan yang meliputi segalanya.

Dalam ajaran Hindu, kata Brahman menunjukkan konsep ke-tak terbatas. Sebagai penjelasan atas Brahman, dikenal konsep Tri Suparna yang mengkategorikan pemahaman Brahman pada tiga bentuk. Bentuk pemahaman yang pertama adalah Brahman yang mutlak yang terlepas dari ciptaan apapun, dalam bentuk ini ia disebut dengan Brahman. Bentuk pemahaman yang kedua adalah Brahman yang bermanifestasi pada alam semesta, dalam bentuk ini ia disebut dengan Wiraj. Bentuk pemahaman dimana Brahman dianggap sebagai roh yang bergerak dimanapun juga di jagatraya ia disebut dengan Hiranyagarbha. Apabila ditambahkan pemahaman Brahman yang

berpribadi dan mengambil peran sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur maka ia disebut dengan Iswara yang diwujudkan dalam bentuk ritual pemujaan Tri Murti.

Untuk memudahkan pengertian tentang Brahman, dibuat ukuran-ukuran tertentu yang lebih mudah dipahami oleh orang kebanyakan. Namun ada masalah besar dalam penentuan ukuran-ukuran tersebut. Hal ini terjadi karena setiap ukuran yang dibuat akan bersifat ambivalen. Ukuran-ukuran yang ditujukan untuk menunjukkan ke-tak terbatasan, justru menjadi batasan bagi Brahman. Untuk memudahkan dalam kehidupan ritual, dikenal dua model penggambaran Tuhan yaitu Nirguna Brahman (Tuhan tanpa atribut) dan Saguna Brahman (Tuhan dengan atribut).

Nirguna Brahman sangat sulit dipuja oleh orang kebanyakan, sehingga dinyatakan sebagai “*Neti neti*” (bukan ini, bukan itu). Karena itu dalam hampir semua sastra Weda, Tuhan digambarkan sebagai Saguna Brahman. Segala sifat dan atribut yang dikenakan pada Brahman pada dasarnya adalah sebagai pendekatan kearah ke-tak terbatasan-nya.

Dalam kitab Narayana Upanisad diterangkan Tuhan dengan nama Narayana,

“Narayana ewedam sarwam yadbutham yacca bhawyam niskalanko niranjano nirwikalpo nirakhyatah suddho dewo eko narayano na dwi tiyo sti kascit”.

Semuanya adalah narayana, baik keberadaan yang ada ini maupun yang akan ada, Narayana hanyalah satu yang tanpa dosa, tak berubah dan tak dapat digambarkan, yang murni dan ilahi, yang tak ada duanya.

Nama tidaklah penting dalam konsep Brahman, sebagaimana yang dinyatakan dalam Rg Weda

“Indram mitram warunamagnimahur”

“Atho diwyah sa suparno garutman”

“Ekam sad wipra bahudha wadanty”

“Agnim yamam matarisvanam ahuh”

Rgveda I.164.46

Mereka menamakannya indra, mitra, waruna, agni dan garutma yang bersayap indah. Karena para bijak terpelajar menyebut yang satu itu dengan banyak nama, dimana yang mulia juga disebut dengan yama (yang menakdirkan) dan matariswan (nafas kosmis).

Pada dasarnya ada dua konsep penting tentang Brahman yang harus dikuasai oleh setiap anggota KMHDI yaitu konsep Brahman yang monotheis dan konsep Brahman yang Acintya (tak terpikirkan, ke-tak terbatasan)

2. Atman

Kata Atman, diambil dari kata “an” yang berarti bernafas. Setelah secara bertahap diperluas, maka artinya kemudian menjadi meliputi kehidupan, roh, sang diri dan inti dari pribadi. Dalam sastra-sastra Weda disebutkan bahwa pengertian Atman, tak dapat dipisahkan dari pengertian Brahman. Karena adanya pembatas yang fana maka Atman terlihat berbeda dengan Brahman. Atman adalah prinsip kesadaran pribadi dan Brahman adalah prinsip kesadaran semesta. Begitu kesadaran murni timbul pada manusia, perbedaan antara keduanya akan lenyap dan keduanya akan menjadi identik. Tuhan selain sebagai sesuatu yang mengatasi kategori manusia, juga sekaligus masuk dan hidup di dalam manusia.

Sariram brahma pravis at

Sarire adhi prajapatih

Atharvaveda XI.8.30

Tuhan Yang Esa memasuki tubuh manusia dan Dia menjadi raja atas tubuh itu.

Atman adalah unsur abadi pada manusia, ia merupakan suatu bagian yang tidak terlahirkan sebagaimana ia tidak pernah akan mati. Pengertian Atman tidak boleh dicampur adukkan dengan pengertian badan, unsur kehidupan, pikiran atau kecerdasan.

Na mrtyave-ava tasthe kadacana

Rgveda X.48.5

Jiwa tidak bisa dihancurkan (kekal)

Hubungan antara atman dan Brahman kiranya dapat dijelaskan dengan salah satu sloka dalam Rgveda.

*Dva suparna sayuja sakhaya
Samanam vrksam pari sasvajate
Tayor anyah pippalam svadu-atti
Anasnan anyo abhi cakasiti*

Rgveda I.164.20

Ada dua ekor burung (jiwa individual dan jiwa yang agung) yang dipersatukan dengan ikatan persahabatan, yang tinggal dalam pohon yang sama, salah satu dari mereka (jiwa individual) menikmati buah matang yang manis (karma) sedangkan yang lainnya (jiwa yang agung) menyaksikan segalanya tanpa menikmati buahnya.

Dan yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa bukan hanya manusia yang diresapi oleh Brahman, hewan dan tumbuhanpun dilingkupi oleh-Nya.

Mahad brahmayena prananti virudhah

Atharvaveda I.32.1

Tuhan adalah sumber kehidupan di dalam tanam-tanaman dan tumbuhan rempah

Semua pengertian tentang logika dan yang terpikirkan bukanlah Atman. Semua pengertian tersebut hanya melingkupi pengungkapan luar dari “Diri Sesungguhnya”, yang merupakan suatu kesadaran diri dan keberadaan diri yang murni. Atman dalam pengertian yang sesungguhnya adalah diri sejati yang mutlak. Ia bukan suatu kategori fisika dan juga bukan suatu kategori metafisika abstrak. Ia adalah diri spiritual yang sejati. Dalam hubungannya dengan manusia sebagaimana yang umum dipahami sebagai makhluk biologis dan psikologis, maka Atman harus dipandang sebagai sesuatu yang mengatasi dua kondisi ini. Implikasi lebih lanjut dari konsep Atman sangat luas, seperti Tat Twam Asi, Ahimsa dan lain sebagainya.

Terdapat suatu perbedaan pengertian yang mendasar dalam konsep Roh agama-agama timur tengah apabila dibandingkan dengan konsep Atman di Hindu. Konsep Roh menyatakan bahwa tubuh memiliki roh yang akan meninggalkan tubuh pada saat kematian badan biologis. Fokus pada konsep ini adalah pada badan biologis. Sedangkan dalam konsep Atman, disebutkan bahwa Atman memiliki tubuh biologis dan pada saat kematian badan biologis, Atman masih tetap eksis. Fokus dalam konsep ini adalah pada Atman.

Sebagai dasar bagi anggota KMHDI, perlu dikuasai konsep keterkaitan Atman dengan Brahman, serta perbedaan konsep roh dengan konsep Atman.

3. Karma

Kata Karma berasal dari kata “kri” yang berarti berbuat atau bekerja. Pengertian berbuat disini adalah perbuatan secara biologis maupun psikologis. Secara teknis kata ini juga dapat diartikan sebagai akibat dari perbuatan.

Konsep Karma harus dipahami sebagai manifestasi akumulasi perbuatan. Karma seseorang bukan ditentukan oleh satu atau dua perbuatan besar, tapi oleh setiap gerakan, setiap degup jantung, setiap kilasan pemikiran dsb. Tidak ada sesuatupun yang tidak berubah dalam dimensi ruang dan waktu karena itu tidak ada sesuatupun yang tidak terikat pada hukum Karma.

*Agham astu aghakrte
Sapathah sapathiyate*

Rgveda V.12.5

Orang yang berdosa menderita dari dosanya sendiri. Orang yang mengutuk menderita dari kutukannya sendiri.

Karena ikatan Karma pada selubung Atman, maka Atman tidak dapat mencapai pelepasan yang sempurna. Untuk itu selubung Atman harus melakukan langkah-langkah tertentu yang akan membebaskan Atman dari keterikatannya.

Tava sariram patayisnu-arvan

Yajurveda XXIX.22

Adalah jiwa yang bergerak, tubuh manusia adalah fana

Sebuah penawaran yang diberikan oleh sastra-sastra Weda adalah dengan melakukan perbuatan-perbuatan tanpa pamrih. Melakukan kegiatan tanpa ikatan, tanpa rasa benci, tanpa rasa senang, tanpa rasa marah, tanpa rasa pamrih sedikitpun. Tanpa ikatan pada kerja yang dilakukan, seorang manusia akan dapat mencapai diri yang mutlak dan lepas dari ikatan Karma.

*Adhursata svayam ete vacobhir
Rjuyate vrjinani bruvantah*

Rgveda X.12.5

Orang-orang yang tidak berjalan lurus seperti aku akan dihancurkan oleh karena kesalahan-kesalahan mereka sendiri

4. Punarbhawa

Punarbhawa adalah konsep lanjutan dari konsep Karma dan Atman. Penjelasan lebih lanjut harap dilakukan oleh para pendidik dan warga didik dalam acara Kaderisasi Tahap I.

5. Moksa

Moksa adalah konsep lanjutan dari konsep Karma, Atman dan Brahman. Penjelasan lebih lanjut harap dilakukan oleh para pendidik dan warga didik dalam acara Kaderisasi Tahap I

2. Pengenalan Organisasi KMHDI

2.1. Sejarah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia

Disusun Oleh : Pengurus Cabang Malang 1997-2000

Pengurus Daerah Jawa Timur 1997-2000

Kenapa Sejarah Itu Penting ? (sebuah peringatan)

(Oleh : Made Surya Putra, Ketua Dept. Litbang PP. KMHDI 1999-2002)

Para pemegang kekuasaan yang ingin melakukan pertanggungjawaban dan legitimasi atas kekuasaannya, pertama-tama akan melakukan penguasaan atas ingatan kolektif, sehingga tidak aneh apabila dimanapun di dunia ini penguasaan terhadap gambaran masa lalu dijadikan sebagai pembenaran atas sistem yang berjalan pada masa sekarang. Karena itu, orang-orang yang menguasai sejarah adalah orang-orang yang mampu mempertanyakan legitimasi penguasa, ini karena masa lampau dikuasai bukan semata-mata untuk masa lampau itu sendiri tetapi demi penguasaan masa depan.

Untuk dapat melakukan pengendalian sejarah, sedikitnya ada dua cara yang digunakan. **Pertama**, pemalsuan sejarah yaitu dengan melakukan penambahan atau pengurangan dalam fakta-fakta sejarah yang diketahui oleh umum. **Kedua**, kebisuan sejarah, kebisuan sejarah umumnya dilakukan atas tiga prinsip utama.

1. Prinsip Legitimasi, Kasus “Kudeta Kecil Lenin”, Kasus Ken Arok dll
2. Prinsip Kondisi Masyarakat, Kasus buku sejarah Jerman pasca 1945 (pembantaian Yahudi), kasus buku sejarah resmi Pemerintah Jepang, kasus PSPB di Indonesia dll
3. Prinsip Sejarah Memalukan

Apakah hanya pemerintah (birokrasi dan militer) yang menyukai langkah manipulasi sejarah ?, ternyata tidak, masyarakat secara umum (bahkan keluarga inti sekalipun !!!) juga dapat melakukan langkah yang sama dalam skala yang lebih kecil.

Dalam bukunya “What is History”, E.H. Carr mengatakan bahwa sejarah adalah proses berkesinambungan dari interaksi antara sejarawan dan fakta-fakta yang dimilikinya, suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa sekarang dengan masa lampau. Ini berarti tidak ada penulisan ataupun buku sejarah yang bersifat final atau selalu dimungkinkan untuk melakukan interpretasi ulang atas sejarah.

Adalah sangat penting bagi setiap orang untuk menguasai sejarah, terutama bagi kader-kader KMHDI yang diprogramkan agar di masa depan menjadi pemimpin-pemimpin Hindu. Penguasaan atas fakta-fakta sejarah akan sangat membantu proses kepemimpinan. Sebagai penutup, berikut ini adalah kutipan dari (rencana) pidato kenegaraan Bung Karno pada 17 Agustus 1966 (pidato ini akhirnya tidak dapat dibacakan oleh Bung Karno, namun tersimpan dalam Arsip Negara)

“Pelajarilah sejarah perjuanganmu sendiri yang sudah lampau. Agar supaya tidak tergelincir dalam perjuangan yang akan datang. Pegang teguh kepada sejarahmu itu. *Never leave your own history*. Peganglah apa yang kita miliki sekarang, yang adalah akumulasi dari hasil semua perjuangan kita di masa lampau. Jikalau engkau meninggalkan sejarah, engkau akan berdiri diatas, *vacuum*, diatas kekosongan. Dan perjuanganmu akan nanti paling-paling bersifat amuk saja, seperti kera di gelap gulita.”

Jasmerah, Ir. Soekarno

A. Tahap Pemunculan Ide

Keinginan mahasiswa Hindu Indonesia untuk memiliki wadah bersama, muncul pada saat diadakannya panel Forum dan Dialog Mahasiswa Hindu oleh KMHD UGM pada tahun 1991. Pada kesempatan itu diusulkan untuk membentuk Forum Komunikasi Mahasiswa Hindu Indonesia dan disepakati KMHD UGM sebagai fasilitator. Tugas dari forum komunikasi tersebut adalah untuk membangun jaringan komunikasi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bagi perguruan tinggi yang belum memiliki KMHD di perguruan tingginya, diserukan agar segera membentuk KMHD yang bisa mengakomodasikan seluruh potensi dan aspirasi Mahasiswa Hindu di masing-masing perguruan tinggi tersebut. Dalam perjalanannya Forum Komunikasi banyak menemui kendala sehingga komunikasi mahasiswa Hindu Indonesia belum berjalan seperti yang diharapkan

B. Tahap Pematapan Ide

Menyadari kendala yang dihadapi oleh forum komunikasi tersebut, dilakukan pembicaraan lebih lanjut dalam Dialog Mahasiswa Hindu yang diselenggarakan pada saat TPKH ITS menyelenggarakan Seminar Nasional mahasiswa Hindu pada tahun 1992. Adapun hasil yang dicapai pada saat itu adalah dibentuknya Korwil (Koordinator Wilayah) di masing-masing kota yang ada perguruan tingginya. Selain itu, untuk membicarakan mekanisme kerja Forum Komunikasi Mahasiswa Hindu, maka akan diadakan Dialog di Bali dengan tetap menunjuk KMHD UGM sebagai penyelenggara. Untuk menindaklanjuti hasil-hasil keputusan di ITS tersebut, pada bulan Agustus 1992 KMHD UGM bekerja sama dengan Senat Mahasiswa Universitas Warmadewa menyelenggarakan Forum dan Dialog Mahasiswa Hindu Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk membahas mekanisme kerja dan biaya operasional dari Forum Komunikasi Mahasiswa Hindu Indonesia. Pada saat inilah muncul usulan untuk membentuk wadah yang bersifat formal dan nasional. Usulan tersebut dilontarkan pertama kali oleh KPMHD Malang selaku Korwil Malang.

Pro dan Kontra sempat mewarnai dialog tersebut. Sebagian peserta dialog mendukung dengan alasan sudah waktunya Mahasiswa Hindu tampil dalam Forum Nasional untuk bersama-sama dengan rekan-rekan mahasiswa yang lain berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Adapula peserta dialog yang tidak mendukung usulan tersebut karena memandang Mahasiswa Hindu belum siap tampil di Forum-Nasional. Perbedaan pandangan ini berlangsung lama dan alot, sehingga dialog harus dibreak untuk diadakan lobi-lobi masing-masing pihak.

Pendekatan secara personal pada saat lobi ternyata berhasil memuaskan semua pihak. Tiga keputusan penting yang dihasilkan yaitu :

1. Dalam waktu enam bulan Mahasiswa Hindu Indonesia harus menyelenggarakan kongres.
2. Biaya kongres ditanggung bersama –sama oleh masing-masing korwil
3. Dibentuk panitia kecil mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kongres.

Pada kesempatan itu juga disepakati bahwa kongres dilaksanakan di Bali dengan Korwil Bali (dalam hal ini FPMHD UNUD) sebagai penyelenggara dan Korwil Malang sebagai panitia kecil (dalam kongres panitia kecil sebagai **Steering Comitte**).

C. Tahap Penyamaan Visi

Untuk menindaklanjuti hasil dialog di Universitas warmadewa, pada tanggal 9 – 11 Oktober 1992 diadakan Malang Informal Meeting (MIM) yang bersamaan dengan kegiatan Dharma Bhakti VIII KPMHD Malang. Tujuan utama dari MIM adalah untuk menyamakan visi dan persepsi tentang wadah yang akan dibentuk serta membuat rancangan materi untuk keperluan kongres. Keputusan penting yang dihasilkan pada saat MIM adalah sebelum kongres perlu diadakan prakongres, yang bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan Mahasiswa Hindu dalam menyelenggarakan kongres.

Pada tanggal 25 – 28 Desember 1992 diadakan Urun Rembug Nasional di kampus IHD Bali (UNHI) yang merupakan istilah lain dari prakongres seperti yang dimaksud

dalam MIM. Urun Rembug ini lebih bersifat kekeluargaan untuk lebih mematangkan pelaksanaan kongres. Namun pada urun rembug ini kembali timbul perbedaan visi dan persepsi tentang wadah yang akan dibentuk. KMHD UGM tetap menghendaki wadah yang bersifat informal sedang seluruh delegasi lainnya menghendaki wadah yang bersifat formal. Setelah melalui perdebatan yang panjang maka KMHD UGM mengambil sikap *walkout*. Untuk mewujudkan wadah formal maka dibentuk tim investigasi yang bertugas mendapatkan informasi .

1. Pelaksanaan kongres diundur sampai bulan September 1993.
2. Tempat kongres tetap di Bali.
3. Untuk membahas rancangan AD/ART, GBHO dan Program Kerja maka diadakan pertemuan lanjutan bertempat di Bali.

Kemudian pada tanggal 8 – 10 dan 14 – 15 Februari 1993 diadakan Bali Informal Meeting (BIM) yang membahas rancangan AD/ART, GBHO dan Program Kerja Organisasi. Hasil penting BIM adalah :

1. Nama organisasi adalah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia yang disingkat KMHDI.
2. Akan diadakan pertemuan lanjutan di Bandung.
3. Penegasan bahwa biaya kongres ditanggung bersama.
4. Menugaskan untuk Korwil Bali dan NTB untuk membuat rancangan program kerja. Korwil Malang untuk membuat rancangan GBHO.
5. Hal-hal lain yang belum dibahas dalam BIM akan dibahas dalam pertemuan di Bandung.
6. Masing-Masing Perguruan Tinggi untuk mengirimkan kalender akademik, untuk mencari waktu yang tepat tentang pelaksanaan kongres.

Untuk menindaklanjuti hasil-hasil BIM maka pada tanggal 18 – 20 April 1993 diadakan Pertemuan Informal Bandung (PIB) di Asrama Mahasiswa Viyata Tirta Gangga dan Ciung Wanara. Hasil-hasilnya sebagai berikut :

1. Kongres tetap diadakan di Bali pada tanggal 1 – 4 September 1993.
2. Menugaskan pada seluruh Korwil untuk memberikan masukan tentang rancangan GBHO KMHDI.
3. Menugaskan Korwil Jakarta untuk membuat Mars KMHDI.

D. Pelaksanaan Kongres Nasional Mahasiswa Hindu Indonesia

Setelah melalui pertemuan-pertemuan yang maraton tersebut maka Mahasiswa Hindu Indonesia berhasil melaksanakan kongres yang menyatakan berdirinya Ormas Mahasiswa Hindu Indonesia dengan nama KMHDI. Pada saat Kongres tersebut dipilih tiga pengurus inti dan KMHDI telah memiliki AD/ART, GBHO, serta pada kongres tersebut Mahasiswa Hindu yang tergabung dalam KMHDI juga menyepakati beberapa pokok-pokok pikiran yang direkomendasikan pada beberapa instansi.

E. Perjalanan KMHDI

Secara defacto KMHDI lahir pada tanggal 3 September 1993 (setelah AD/ART) berhasil disusun dan disahkan pada saat kongres. Namun demikian, organisasi yang baru lahir dan belum berpengalaman, KMHDI belum bisa eksis di kalangan masyarakat luas, karena beberapa kendala yang dihadapi pada saat kelahirannya. Kendala utama adalah belum solidnya pengurus Pimpinan Pusat KMHDI. Hal ini disebabkan karena, secara personal tidak memahami tugas dan wewenangnya masing-masing. Kondisi ini ditambah lagi dengan putusannya komunikasi antar pengurus dan Pimpinan Pusat dengan Pimpinan daerah sehingga terkesan bahwa KMHDI selama ini berjalan sendiri-sendiri, serta minimnya biaya untuk menjalankan roda organisasi.

Dengan segala kekurangan dan kendala yang dihadapi, KMHDI sampai saat ini juga telah melaksanakan konsolidasi sehingga beberapa Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang telah terbentuk. Beberapa peraturan organisasi telah berhasil dimiliki walaupun pelaksanaannya belum bisa seperti yang diharapkan. KMHDI yang telah dirintis melalui perjalanan panjang memakan waktu, tenaga, pikiran, serta materi yang tidak sedikit, sempat nyaris mandeg pada kondisi yang tidak menentu. Mencermati KMHDI yang

berada pada kondisi kritis, maka beberapa tokoh pendiri dan penerusnya bertekad untuk menyelamatkan KMHDI melalui Mahasabha II yang seharusnya diselenggarakan pada bulan September 1996 di Jakarta, tetapi dialihkan ke Malang (yang saat itu secara kader dan persiapan lebih siap).

2.2. (IDEOLOGI KMHDI) PENJELASAN ATAS PURWAKA AD/ART KMHDI

Disusun dari kumpulan tulisan :

1. Made Surya Putra, Sekretaris III PD KMHDI Jatim 1994-1997
2. Made Surya Putra, Ketua I PC KMHDI Surabaya 1994-1998
3. Made Surya Putra, Ketua Dept. Litbang PP. KMHDI 1999-2002

Pengantar

Ketika bangsa Indonesia yang masih sangat muda, dihadapkan dengan masalah-masalah kenegaraan sesudah kemerdekaan, terjadi silang pendapat antar elit kekuasaan yang berimbas terhadap kehidupan rakyat. Situasi ini belum mampu dihentikan sekalipun rejim yang berkuasa telah berganti dari waktu ke waktu. Sistem pemerintahan otoriter yang menegakkan kekuasaan dengan kekerasan, menimbulkan antipati rakyat terhadap bentuk-bentuk kekuasaan, yang pada akhirnya menurunkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemusatan kekuasaan yang disertai dengan penindasan politik, sosial dan budaya yang dilakukan secara sistematis dalam suatu sistem birokrasi negara yang ditujukan untuk melanggengkan kekuasaan, telah meng-hegemoni masyarakat pada semua tingkatan sosial.

Setelah kejatuhan Orde Baru, terpampang harapan baru bagi bangsa Indonesia, namun KMHDI harus belajar dari pengalaman, bahwa masa depan tergantung dari tindakan manusia sendiri, selalu ada kemungkinan untuk kembali ke suatu masa yang KMHDI kira telah lenyap untuk selamanya. Karena itu perjuangan untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang mandiri harus terus diperjuangkan setahap demi setahap dengan menghadapi semua rintangan yang ada. Kemajuan apapun yang telah dicapai akan selalu berada dalam keadaan bahaya apabila tidak ada upaya untuk terus memajukannya. Bangsa Indonesia terutama harus mengejar ketertinggalannya dalam masalah sumber daya manusia.

Sebagai sebuah bagian dari komponen bangsa, KMHDI harus ikut memikul tanggung jawab tersebut. Pertanyaan yang mungkin muncul dari orang-orang yang baru mengenal KMHDI adalah “Kenapa KMHDI harus ikut memikul tanggungjawab atas perkembangan masyarakat?”. Ada dua alasan utama yang melatarbelakangi tindakan ini.

1. Alasan pertama adalah alasan normatif, “Manusia yang bermartabat, adalah manusia yang bertanggungjawab”. Setiap kader KMHDI sebagai manusia yang bermartabat harus bersedia mengambil tanggungjawab atas segala perubahan yang mungkin terjadi atas dirinya dan lingkungannya.
2. Alasan kedua adalah alasan pragmatis yang sangat praktis, ini dikenal dengan Hutang Waktu Produktif Pada Masyarakat. Pengertiannya adalah sebagai berikut. Setiap pelajar, di Sekolah Dasar, di Sekolah Menengah Pertama, di Sekolah Menengah Umum dan di perguruan tinggi memiliki hutang waktu produktif kepada masyarakat. Kenapa hutang tersebut dapat terjadi ?. Karena selama menerima pendidikan, masyarakat telah mengijinkan seorang pelajar untuk tidak melakukan kegiatan produktif yang dapat menghasilkan sesuatu bagi masyarakat.

Sebagai contoh, andaikan seorang anak berumur 12 tahun (yang baru menyelesaikan pendidikannya di sekolah dasar) memutuskan untuk bekerja dan tidak melanjutkan sekolah. Apabila si anak menjadi seorang penangkap ikan, maka ia telah berkontribusi kepada masyarakat dalam bentuk ikan yang ditangkapnya, apabila si anak memilih menjadi seorang penanam padi, maka ia berkontribusi pada masyarakat dengan padi yang dihasilkannya. Namun bila ia memilih untuk melanjutkan pendidikannya hingga strata perguruan tinggi, maka selama ia belajar di bangku sekolah formal, ia tidak akan menghasilkan apapun bagi masyarakat dan justru menghabiskan sumber daya masyarakat.

Hitungan waktu hutang waktu produktif pada masyarakat ini, berjangka sangat panjang, bukan harian, bukan bulanan tapi puluhan tahun. Setiap kader KMHDI adalah mahasiswa, yang dari sejak kelahirannya hingga lulus sebagai

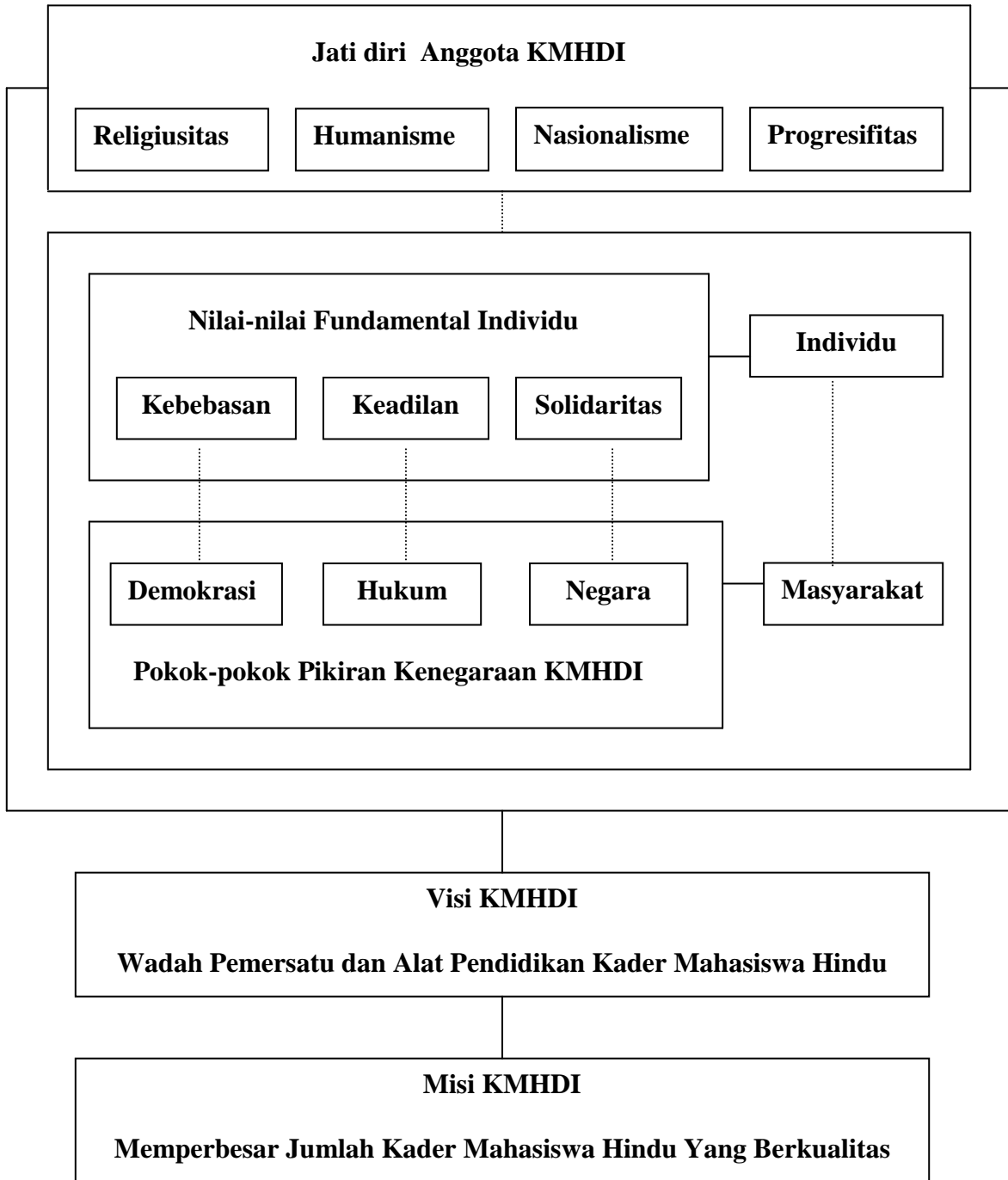
sarjana menghabiskan waktu sekitar 21-24 tahun membebani masyarakat. Hutang inilah yang harus diingat baik-baik oleh setiap kader KMHDI, untuk kemudian harus dibayar kepada masyarakat dalam bentuk ilmu yang terapkan.

Karena itu, adalah suatu hal yang sangat ironis dan memalukan apabila kader-kader KMHDI ikut menikmati hasil-hasil dari suatu perubahan tanpa ikut terlibat dalam mengusahakan perubahan tersebut. Untuk itu KMHDI harus merumuskan ulang konsep-konsep dasar yang akan dijadikan pegangan bagi perjalanan organisasi ini. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan “ideologi” KMHDI dalam menyikapi berbagai permasalahan organisasi dan anggota-anggota KMHDI.

KMHDI merumuskan pokok-pokok pikiran kenegaraan dalam tiga hal, yaitu negara, hukum dan demokrasi. Pokok-pokok pikiran kenegaraan KMHDI ini tidak dapat dilepaskan dari pengakuan KMHDI atas nilai-nilai fundamental seorang individu yaitu kebebasan, keadilan dan solidaritas. Seluruh konsep diatas kemudian diwadahi dalam konsep jati diri Anggota KMHDI. Dan sebagai penjabar atas tindakan strategis, maka penjelasan atas Visi dan Misi KMHDI akan menutup tulisan ini.

Jalinan konsep kenegaraan, nilai-nilai fundamental, jati diri dan visi misi KMHDI tersebut, untuk memudahkan pengertiannya, akan dibuat dalam bentuk bagan sebagai berikut

Bagan Ideologi KMHDI



PENJELASAN

Konsep Nilai-nilai Fundamental Individu KMHDI

Secara teoritis, harus diingat oleh semua kader KMHDI bahwa pada awalnya tidak ada negara ataupun masyarakat. Yang ada adalah individu-individu yang secara naluriah sejak lahirnya telah memiliki rasa-rasa kebebasan, keadilan dan solidaritas didalam dirinya. Nilai-nilai ini tidak dapat dihilangkan dari diri seorang manusia dengan cara apapun. Nilai-nilai kebebasan, keadilan dan solidaritas saling bergantung satu dengan yang lainnya dan sama penting. Tanpa perlu diajarkan tentang teori kebebasan, seseorang akan dapat mengetahui apakah dirinya sedang dalam situasi bebas atau terkekang. Demikian pula dengan nilai keadilan, tanpa harus diberikan pembelajaran tentang keadilan, seseorang dapat mengetahui bahwa telah terjadi ketidakadilan atas dirinya. Pengujian yang sama dapat dilakukan atas nilai solidaritas. Mengapa semua hal tersebut dapat terjadi ?. Satu-satunya jawaban yang mungkin adalah karena setiap manusia, tanpa memandang ras, suku, bangsa dan agama telah memiliki ketiga nilai fundamental tersebut didalam dirinya sejak ia dilahirkan.

Kesamaan kedudukan bagi ketiga nilai ini berlaku dalam setiap bidang kehidupan, ini berarti kebebasan individu tidak dapat dihapuskan atas tuntutan bagi solidaritas yang semu karena situasi ini akan menimbulkan ketidakadilan bagi individu-individu yang secara lahir memiliki perbedaan-perbedaan. Juga tidak dapat diberikan prioritas mutlak bagi suatu kebebasan, karena akan menimbulkan eksklusifitas dalam suatu kelompok, yang kemudian akan menghapus nilai-nilai keadilan dan persamaan derajat yang berimplikasi terhadap menipisnya solidaritas. Solidaritas harus tumbuh dan berkembang dengan suatu dorongan yang timbul dari kehendak masyarakat itu sendiri, dengan kata lain solidaritas tidak boleh dipaksakan.

1. Kebebasan

Kebebasan berarti hak setiap individu untuk mengembangkan kepribadiannya di dalam batas yang ditetapkan oleh keadilan dan solidaritas. Kebebasan berarti pula bebas dari ketergantungan yang merendahkan martabat dari pihak lain. Aspek hukum formal dari konsep kebebasan terdiri dari perlindungan terhadap pelanggaran atas hak seseorang oleh orang yang lainnya. Situasi ini harus didukung dengan aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya. Ini berarti negara harus mampu memberikan jaminan secara aktual bagi para individu warga negaranya agar selalu berada dalam suatu kondisi fisik dan psikis yang membuatnya mampu menjalaninya kehidupannya atas tanggung jawabnya sendiri.

Jaminan sosial dari negara, bukan sebuah timbal balik dari hal-hal tertentu yang telah dilakukan oleh warga negara, namun sudah menjadi kewajiban dari negara dengan pemerintahan yang sedang mengelolanya, bahwa kesejahteraan sosial dari rakyatnya adalah sebuah syarat mutlak bagi terjaminnya kebutuhan fisik dan psikis yang pada akhirnya akan membuatnya mampu menjalaninya kehidupan atas tanggung jawabnya sendiri.

2. Keadilan

Keadilan mengandung makna kebebasan yang sama bagi semuanya, dengan hak-hak dasar yang sejajar bagi individu dengan jaminan perlindungan dari negara melalui pranata hukum positif yang dijalankan oleh pemerintah. Mengingat keadilan bagi suatu masyarakat baru akan terwujud apabila kebutuhan materi dan sosial telah terpenuhi bagi individu-individu didalamnya, maka adalah wajar apabila semua anggota masyarakat yang berkepentingan, ikut memberikan kontribusi maksimal dengan menggunakan hak politik yang dimilikinya selaku warga negara, bagi terbentuknya suatu sistem pemerintahan yang berkeadilan yang akan menjamin pelaksanaan hak-hak dasar individu. Kondisi sebagaimana yang diinginkan, baru akan terwujud jika seluruh anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan sejati bagi pengembangan dan pengamalan jati dirinya.

3. Solidaritas (Perasaan Senasib Sepenanggungan)

Solidaritas memberikan makna yang moderat bagi kebebasan, sikap solidier ini memberi makna ganda. Menurut tradisi masyarakat Indonesia, solidaritas merupakan pengejawantahan bagi kepaduan dan kegotong-royongan dari mereka yang secara bersama-sama memperjuangkan hak-hak yang sama. Atas dasar solidaritas inilah, warga masyarakat yang lemah akan memperoleh kembali kebebasannya. Solidaritas juga bermakna umum, sebagai sebuah ungkapan kesaling tergantungan rakyat, solidaritas merupakan peringatan bagi mereka untuk saling membantu dan memperlihatkan tanggung jawab terhadap satu sama lainnya. Solidaritas hanya dapat terwujud dengan dasar sukarela. Dengan terwujudnya suatu masyarakat yang adil, dengan suatu syarat mutlak, dimana individu-individu memperlakukan individu yang lain sebagai orang yang bebas dan sederajat, maka perasaan solidaritas yang timbul akan semakin besar.

Pokok-pokok Pikiran Kenegaraan KMHDI

Nilai-nilai fundamental individu yang bersifat sangat pribadi, akan berubah menjadi nilai yang berbeda ketika suatu masyarakat telah terbentuk. Dalam level pribadi, masalah yang benar atau yang salah dalam bidang kebebasan, keadilan dan solidaritas, tergantung pada alasan dan kesadaran pribadi-pribadi. Namun ketika seorang individu telah memasuki situasi bermasyarakat dalam bentuk negara atau kelompok sosial lainnya, maka nilai-nilai yang dianutnya harus berkompromi dengan nilai yang dimiliki oleh individu lainnya dalam bentuk suatu "kesepakatan nilai-nilai".

Dalam sebuah masyarakat, nilai kebebasan individu akan berubah menjadi kebebasan kolektif, keadilan akan menjadi nilai keadilan kolektif sedangkan nilai solidaritas yang telah bermakna kolektif, meluas dari solidaritas dengan derajat yang sempit, ke derajat yang lebih luas. Semua nilai ini hanya dapat diterapkan dalam suatu masyarakat yang setiap individunya menyadari bahwa dirinya berada dalam posisi yang sederajat, di-syaratkan suatu masyarakat dengan tidak ada dan tidak boleh ada hak-hak khusus yang akan menempatkan individu atau sekelompok masyarakat berada diatas individu atau kelompok masyarakat yang lain.

Ketika akhirnya masyarakat menjelma menjadi sebuah negara, maka nilai kebebasan kolektif disebut dengan *demokrasi*, nilai keadilan kolektif yang telah dirumuskan ulang oleh keseluruhan masyarakat, dirumuskan dalam bentuk *hukum* yang mengikat seluruh warga negara. Sedangkan nilai *solidaritas*, dalam sebuah negara, akan menjadi pengikat dari kesatuan suatu negara. Dengan demikian, ketika masyarakat membentuk suatu negara, maka nilai-nilai demokrasi dan hukum harus selalu ada didalamnya. Berikut ini adalah pokok-pokok pikiran KMHDI tentang kenegaraan.

1. Negara

Konsep negara sebagai sebuah sistem pemerintahan terpusat dan dikendalikan hanya oleh lobi-lobi beberapa kelompok elit dalam suatu lingkaran dalam para pengambil keputusan, harus dirubah dengan suatu konsep tentang negara bangsa yang mampu memberikan ruang yang luas bagi partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Negara bangsa ini, juga harus mampu mengakomodasi pluralitas yang ada pada masyarakat dan bukan menggunakan pluralitas tersebut sebagai sebuah senjata yang potensial untuk memecah belah kesatuan.

Satu hal yang selama ini telah menjadi perekat yang sangat kuat bagi kesatuan bangsa Indonesia, adalah perasaan senasib sepenanggungan (solidaritas) sebagai sebuah bangsa. Perasaan ini timbul secara alamiah dari suku-suku tradisional yang berada dalam naungan ibu pertiwi. Penegasan oleh KMHDI, sebagai bagian dari anak bangsa, akan komitmennya pada sebuah bangsa yang satu, adalah sangat penting, terutama pada saat rasa persatuan mengalami proses pendangkalan. Penegasan ini harus disertai dengan suatu tindakan nyata yang berimplikasi pada kemajuan usaha-usaha tersebut.

Pada sisi praksis, KMHDI harus melibatkan diri pada usaha pemberdayaan rakyat yang ditujukan untuk memandirikan rakyat, yang pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi rakyat terhadap proses bernegara dan berbangsa. Pemikiran kedaerahan yang mencuat kepermukaan, harus segera dianalisa dengan penawaran solusi-solusi dengan menggunakan asumsi bahwa negara harus menghormati martabat para warganya dan dalam setiap tindakannya harus untuk melayani rakyat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, KMHDI harus mendorong negara untuk membentuk suatu bangunan sosial sedemikian rupa, sehingga bangunan sosial itu cocok bagi hak-hak dasar setiap warga negaranya dan martabat warga negaranya dapat dilindungi. Adalah kewajiban dan tugas negara untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan individu untuk mewujudkan potensinya dalam penentuan nasib sendiri yang bebas. Organisasi masyarakat bukanlah perpanjangan tangan dari pemerintah dengan kecenderungan sebagai pengawas tetapi sebagai wadah yang akan membantu individu dalam melaksanakan haknya menentukan nasib sendiri.

Trias politika sebagai sebuah konsep pemisahan kekuasaan antara Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif, harus segera diterapkan, untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu pihak. Bangsa Indonesia secara kolektif telah melakukan dua kali kesalahan yang sama, dengan membiarkan terjadinya pemusatan kekuasaan pada lembaga kepresidenan seperti yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin (1959-1966) dan pada masa Orde Baru (1966-1998). Konsep Trias Politika adalah sebuah pilihan mutlak bagi bangsa Indonesia, sebagai sebuah langkah maju dalam mewujudkan sebuah negara dengan kedaulatan rakyat.

Dengan mengacu pada Trias Politika, maka akan dapat dapat diwujudkan suatu konsep yang dinamakan dengan kemerdekaan negatif (Isiah Berlin). Dalam konsep ini, pemerintah dipandang sebagai agen yang paling mungkin untuk membatasi kemerdekaan individu. Untuk itu, perlu dirancang suatu mekanisme pengawasan yang memungkinkan dilakukannya pengawasan antar lembaga pemerintah. Dengan demikian tidak satupun bagian pemerintah yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu terhadap warga negara tanpa pengawasan dari badan yang lain. Kondisi paripurna yang diharapkan dari konsep ini adalah situasi *check and balances* didalam penyelenggaraan negara yang akan lebih menjamin kebebasan individu.

Sebuah pemikiran yang lain adalah harus adanya desentralisasi kekuasaan di dalam tubuh lembaga eksekutif, Semakin luas kekuasaan politik lembaga eksekutif di-desentralisasikan, maka semakin besar kemungkinan para warga negara untuk berperan aktif dalam penentuan nasib mereka sendiri. Wujud desentralisasi politik adalah pemberian hak menentukan nasib sendiri sebesar mungkin kepada pemerintahan setempat.

2. Hukum

Penguatan daya dan kepastian hukum sangat diperlukan dalam sebuah proses menuju sebuah bangsa yang beradab dan memiliki norma-norma dalam kehidupan sosial. Hukum harus menjadi panglima dalam pencarian keadilan bagi setiap warga negara. Proses dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum positif, harus selalu memihak pada keadilan. Proses ini harus dapat dikontrol oleh rakyat secara aktif dalam bentuk partisipasi politik mereka.

Kediktatoran yang pernah dipraktekkan di Indonesia, harus selalu mengingatkan KMHDI akan perlunya keadilan, kekuasaan berdasarkan hukum dan perlindungan bagi individu dari kesewenang-wenangan dan penggunaan kekerasan. Martabat manusia tidak boleh dilanggar oleh siapapun walaupun itu sebuah sistem rumit yang disebut dengan negara, kepastian akan hal ini harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dalam pembentukannya dan pembuatannya harus melibatkan partisipasi rakyat sebagai komponen yang utama. Kemerdekaan pengadilan dan hakim dari intervensi siapapun atau apapun

merupakan sebuah ciri yang penting dari suatu negara yang berdasarkan hukum. Dan partisipasi rakyat dalam pembuatan perundang-undangan yang akan dijalankan oleh pengadilan adalah mutlak sebagai sebuah pengejawantahan dari hak untuk menentukan nasib mereka sendiri.

3. Demokrasi

Tanpa demokrasi tidak akan mungkin ada keadilan, kekuasaan yang terbentuk dan dimiliki oleh suatu sistem, apabila berdasarkan hukum dan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, yang walaupun ditujukan untuk menentang sistem yang tengah berkuasa, adalah hal-hal yang sangat esensial bagi suatu masyarakat yang ingin mewujudkan tempat hidup yang layak bagi umat manusia. Manakala demokrasi dihancurkan, maka kebebasan dan keadilan akan terbang ke awang-awang dan kepentingan rakyat tidak lagi dapat dilindungi dengan efektif.

Demokrasi tidak dapat diwujudkan sebagai suatu realitas hanya dengan melalui pemilihan umum periodik. Demokrasi memerlukan peran serta aktif dan berkelanjutan dari warga negara di dalam proses politik. Dalam aplikasinya, negara harus dapat menjamin adanya kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat bagi setiap warga negara dengan fokus pertama adalah pemberian kebebasan yang sebesar-besarnya bagi pers. Dengan kebebasan pers, masyarakat secara perlahan-lahan akan mengalami proses pendewasaan diri dalam menganalisa pemberitaan oleh pers tersebut dan akan mampu memilah wacana-wacana yang sesuai bagi mereka dengan daya kritis yang dimilikinya. Pengawasan terhadap pers akan dilakukan oleh masyarakat sendiri, melalui lembaga yudikatif yang melaksanakan amanat rakyat dengan seadil-adilnya melalui hukum-hukum positif yang ada.

Negara demokratis hanyalah berada dalam kedudukan memberi bentuk-bentuk yang diinginkan oleh masyarakat, bukan oleh kepentingan perhimpunan-perhimpunan yang berpengaruh atau oleh kekuatan ekonomi yang dominan. Setiap kelompok memiliki hak untuk berperan serta dalam pembentukan kebijakan politik namun pada akhirnya, rakyat secara keseluruhan yang harus menegaskan sendiri keinginan mereka. Dengan nilai-nilai demokratis dalam dirinya, negara akan mampu menjadi sebuah negara yang beradab dan memperoleh substansi kekuasaannya dari kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat dan membantu mengembangkan semangat kreatif rakyat.

Konsep Jati diri anggota KMHDI

KMHDI didirikan dengan tujuan untuk mewadahi mahasiswa Indonesia yang beragama Hindu dalam melaksanakan dharma-nya bagi agama dan negara. Konsep-konsep dasar tentang keber-agama-an harus dirumuskan KMHDI dengan komponen masyarakat Hindu yang lain, sedangkan untuk mengantisipasi situasi bernegara dan berbangsa yang berkembang dengan sangat cepat, maka KMHDI sebagai sebuah organisasi yang independen harus meneguhkan kembali konsep-konsep dasar tentang negara bangsa yang dicita-citakannya

Konsep tentang jati diri ini disusun sebagai sebuah penunjuk arah dalam mewujudkan cita-cita KMHDI tentang individu dan negara. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, nilai-nilai fundamental individu telah melekat dalam setiap individu, sedangkan Pokok-pokok pikiran KMHDI tentang negara (masyarakat) masih dalam bentuk angan-angan yang harus diwujudkan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka KMHDI harus memulai dengan melakukan pendidikan terhadap kader-kadernya, dengan cara yang sistematis dan dengan standar kualitas tertentu, agar pada akhirnya setiap kader KMHDI mampu menjadi pionir dalam mewujudkan cita-cita besar tentang negara dan masyarakat yang diidamkan. Standar kualitas yang harus diwujudkan dari pendidikan yang dilaksanakan oleh KMHDI adalah sebagaimana yang tercantum dalam Konsep Jati Diri Anggota KMHDI.

Sosok ideal kader KMHDI adalah mahasiswa Indonesia yang beragama Hindu dan memiliki kualitas religius, humanis, nasionalis dan progresif. Keempat sifat ini harus berpadu dalam suatu diri manusia yang disebut dengan anggota KMHDI

1. Religiusitas

Adalah nilai-nilai dasar yang harus tertanam dalam diri setiap anggota KMHDI sebagai sebuah perwujudan terhadap darma agama. Nilai religiusitas harus diartikan secara luas, yang bermakna nilai-nilai tersebut bukan hanya harus menjadi pegangan individual anggota KMHDI. Nilai-nilai religiusitas juga harus diterapkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dimana individu anggota KMHDI tersebut berada. Ini bukan berarti bahwa masyarakat yang diinginkan oleh KMHDI adalah sebuah masyarakat yang berlandaskan pada satu agama, karena nilai-nilai religiusitas terdapat dalam setiap batang tubuh agama yang ada, namun nilai religiusitas harus terwujud dengan cara penerapan nilai-nilai keagamaan yang universal dalam setiap gerak langkah anggota KMHDI dalam melaksanakan hak dan kewajiban sosialnya pada sisi politik, ekonomi dan budaya.

Nilai religiusitas pada sisi lain, dimaknai sebagai sebuah keperdulian akan agama Hindu, dimana setiap anggota KMHDI harus memiliki kemampuan penguasaan agama, yang disertai dengan keinginan untuk secara terus menerus melakukan pengkajian ulang yang kritis pada setiap nilai-nilai dasar dan praktek-praktek keagamaan yang berkembang pada masyarakat Hindu.

2. Humanisme

Kesadaran bahwa setiap manusia pada dasarnya adalah percikan kecil dari tuhan dan dalam inti terdalamnya setiap manusia memiliki sifat-sifat ketuhanan yang sama sebagaimana yang termaktub dalam konsep Atman, adalah dasar dari nilai humanisme Hindu. Anggota KMHDI harus mampu memandang setiap sosok individu manusia lain sebagai cerminan dari dirinya sesuai dengan konsep Tat Twam Asi. Pengkotakan-pengkotakan yang selama ini dilakukan dan secara riil ada dalam masyarakat yang pembagiannya berdasarkan atas warna kulit, agama, kasta, suku bangsa, bahasa, kepercayaan, nilai budaya dan lain-lain, harus disadari oleh anggota KMHDI sebagai sebuah kekeliruan yang bukan hanya telah terjadi berabad-abad, tetapi telah terjadi sejak manusia mampu berpikir bahwa dirinya adalah seorang manusia.

Humanisme juga harus diterjemahkan sebagai sebuah konsep dengan keinginan untuk membantu umat manusia yang lain, dan bukan hanya tidak mengganggu umat manusia yang lain. Humanisme yang dianut oleh anggota-anggota KMHDI tidak menafikan perbedaan yang secara riil terjadi pada masing-masing individu, namun menyadari bahwa perbedaan tersebut hanyalah sebuah perbedaan yang tampak pada sisi luar. Pada sisi terdalam setiap manusia, sesuai dengan konsep atman, semua manusia adalah sama. Sebagai sebuah perwujudan dari nilai humanisme yang universal, anggota KMHDI harus memiliki keperdulian yang aktif dalam menyikapi setiap masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi.

3. Nasionalisme

Adalah sebuah penerjemahan dari keinginan anggota KMHDI untuk melakukan darma negara. Nasionalisme yang dianut bukan nasionalisme chauvinis, akan tetapi nasionalisme yang tumbuh dari perasaan senasib dengan saudara sebangsa (solidaritas) dan perasaan saling menghormati dengan saudara lain bangsa. Nasionalisme diartikan sebagai sebuah rasa ikut memiliki bangsa dan karenanya ikut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dari bangsa itu sendiri.

Sebagai sebuah bagian dari komponen bangsa, anggota KMHDI harus memandang komponen bangsa yang lain sebagai saudara, dengan memposisikan diri sebagai warga negara yang menentang bentuk-bentuk masyarakat yang eksklusif dalam wujud primordialitas atau sektarianisme. Anggota KMHDI harus secara aktif berpartisipasi dalam pembentukan sebuah negara bangsa.

4. Progresifitas

Sebagai individu-individu yang memiliki kepedulian akan perjalanan bangsa, umat manusia dan agama, Anggota KMHDI harus mengambil posisi sebagai manusia yang progresif, siap akan perubahan, menjadi pionir perubahan dan bukan hanya menunggu suatu perubahan terjadi. Kader KMHDI harus selalu berada pada garda terdepan dalam suatu proses perubahan yang diyakini akan mampu memperbaiki situasi. Sejarah telah membuktikan, bahwa progresifitas pemikiran dan tindakan, sangat diperlukan pada saat suasana kemandegan menghantui gerak langkah kemanusiaan. Progresifitas yang dianut, hendaknya adalah sebuah progresifitas yang mewujudkan, anggota KMHDI harus selalu siap untuk berada pada lapisan terdepan dan bukan hanya sebagai pengikut pasif yang reaksioner.

Dalam terminologi KMHDI, progresifitas berarti bahwa anggota KMHDI harus menjadi orang-orang yang menelurkan ide, melaksanakan ide tersebut dan siap akan proses dialektika dari ide tersebut. Proses dialektika yang akan melahirkan tesis, antitesis dan akhirnya mewujudkan sintesis yang akan terus berulang. Proses dialektika dan bentuk gerakan yang progresif, harus diyakini sebagai sebuah langkah konstruktif bagi perbaikan bangsa, kemanusiaan dan agama.

Visi KMHDI

Sebagaimana yang dirumuskan dalam Purwaka (Pembukaan AD/ART KMHDI), maka Visi KMHDI adalah sebagai Wadah Pemersatu dan Alat Pendidikan Kader Mahasiswa Hindu. Apabila diperhatikan, terlihat bahwa visi ini adalah turunan dari nilai-nilai semangat para pendiri KMHDI sebagaimana yang terungkap dalam Kongres Nasional Mahasiswa Hindu Indonesia. Ada dua konsep besar yang mengemuka disini, yang pertama adalah konsep KMHDI sebagai Wadah Pemersatu Mahasiswa Hindu Indonesia, dan yang kedua adalah KMHDI sebagai Alat Pendidikan Kader Mahasiswa Hindu Indonesia.

1. Wadah Pemersatu Mahasiswa Hindu Indonesia

Sebagaimana peribahasa klasik, “Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh” maka usaha KMHDI untuk mempersatukan Mahasiswa Hindu Indonesia ini adalah dalam rangka memperkuat barisan generasi muda Hindu dalam menjawab berbagai tantangan jaman. Sejarah telah membuktikan bahwa dengan persatuan dalam ide dan konsep yang kemudian diwujudkan dalam sebuah organisasi modern yang sistematis, terstruktur dan berskala nasional, komponen-komponen kecil yang tercerai-berai akan memiliki cukup kekuatan menuju masa depan yang lebih baik.

Konsep KMHDI sebagai wadah pemersatu memberi arti bahwa KMHDI harus melakukan segala hal yang dimungkinkan untuk mempersatukan gerakan Mahasiswa Hindu Indonesia. Persatuan yang diinginkan oleh KMHDI bukanlah persatuan secara fisik yang mensyaratkan peleburan semua organisasi mahasiswa Hindu Indonesia ke dalam tubuh KMHDI. Persatuan yang diidamkan oleh KMHDI adalah persatuan dalam tataran ide, dengan ide dasar “Membangun generasi muda Hindu demi masa depan Hindu yang lebih baik”. KMHDI tidak menafikan eksistensi organisasi-organisasi Hindu lain, yang berskala lokal, regional, nasional atau internasional, yang melakukan gerakan yang berbasiskan mahasiswa Hindu Indonesia. KMHDI tidak akan pernah melakukan klaim bahwa hanya KMHDI yang berhak untuk melakukan pengkaderan atas calon pemimpin Hindu di masa depan. KMHDI bersedia melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi lain yang memiliki ide dasar yang sama dengan KMHDI.

2. Alat Pendidikan Kader Mahasiswa Hindu Indonesia.

Pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam KMHDI, bukanlah suatu pendidikan formal yang ditujukan untuk mencapai suatu status atau gelar tertentu. Pendidikan dalam tubuh KMHDI ditujukan untuk membentuk membentuk Kader

Mahasiswa Hindu Indonesia yang berkualitas. Dalam terminologi KMHDI, Kader Mahasiswa Hindu Indonesia yang berkualitas tersebut adalah suatu sosok kader KMHDI yang religius, humanis, nasionalis dan progresif yang bersedia berjuang di jalan Hindu untuk mewujudkan situasi kebebasan, keadilan dan solidaritas bagi semua individu yang berada dalam suatu negara yang berasaskan demokrasi dan hukum. Pertanyaan yang akan mengemuka berikutnya adalah “Pendidikan seperti apa yang akan mampu membentuk kader dengan kualitas seperti diatas?”. Pendidikan yang dipilih oleh KMHDI bagi kader-kadernya adalah suatu pendidikan yang sistematis dan terstruktur sebagaimana yang termaktub dalam sistem kaderisasi KMHDI, dengan materi-materi pelatihan yang dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat mewakili berbagai terma dari kualitas kader yang diinginkan.

Selain pendidikan pada tataran wacana, KMHDI juga berkeinginan untuk mendidik kader-kadernya dalam memupuk kemampuan memimpin dalam tataran praxis. Ini karena sejak awal pendiriannya, mahasiswa Hindu Indonesia telah sepakat bahwa KMHDI akan menjadi organisasi dengan skala nasional yang disediakan bagi mahasiswa Hindu Indonesia untuk melatih kemampuannya dalam melakukan mobilitas horisontal ataupun mobilitas vertikal. Kedua jenis mobilitas ini dikenal dengan “*tour of duty*” dalam istilah militer dan birokrasi.

Sebagaimana arti harfiahnya, mobilitas horisontal berarti gerakan menyamping (dari satu komisariat ke komisariat yang lain, dari satu PC ke PC yang lain, dari satu PD ke PD yang lain). Dalam terminologi KMHDI, yang dimaksud dengan mobilitas horisontal adalah ketika kader KMHDI melakukan pergerakan kepemimpinan atau ide yang melewati atau meliputi struktur-struktur yang lebih luas dari batasan-batasan wilayah tradisionalnya, maka KMHDI sebagai sebuah organisasi yang berskala nasional, akan melakukan segala hal yang dimungkinkan untuk mendukung pergerakan tersebut. Pergerakan horisontal ini penting karena, hanya dengan pergerakan seperti ini seorang kader KMHDI mampu mengenal dan berkomunikasi dengan kader-kader KMHDI yang berada di lain daerah. Dengan melakukan pergerakan horisontal, seorang kader KMHDI akan memiliki wawasan tentang berbagai masalah yang terjadi di berbagai daerah, sehingga ketika pada akhirnya harus menjadi seorang pemimpin nasional, kader KMHDI akan selalu siap akan berbagai variasi masalah yang mungkin muncul. Yang ditekankan dari mobilitas horisontal ini adalah kemampuan kepemimpinan seorang kader untuk mengatasi berbagai variasi masalah.

Sedangkan gerakan vertikal adalah suatu gerakan yang bersifat tegak lurus ke atas (dari komisariat ke PC, dari PC ke PD, dari PD ke Pusat). Makin keatas, akumulasi masalah menjadi makin besar, yang berarti kader yang berhasil memasuki wilayah mobilitas vertikal ini akan terlatih dalam melakukan penyelesaian masalah dari masalah-masalah yang ringan dan mencakup skala yang sempit hingga masalah-masalah berat dengan skala yang lebar. Ini berarti, KMHDI berlaku sebagai sebuah organisasi yang menyediakan wadah pelatihan diri dalam menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat akumulatif secara kuantitas dan kualitas, bagi mahasiswa Hindu Indonesia. Semakin bergerak ke atas, seorang kader akan menghadapi masalah yang makin berat dengan tuntutan waktu penyelesaian yang makin pendek. Bagi kader-kader yang sadar dengan proses pembelajaran, maka ini adalah lahan terbaik untuk melakukan pelatihan diri dalam hal kepemimpinan. Yang ditekankan dari mobilitas vertikal ini adalah, kemampuan kepemimpinan seorang kader KMHDI untuk mengatasi masalah-masalah yang bersifat akumulatif secara kuantitas dan kualitas

Misi KMHDI

Misi KMHDI adalah “Memperbesar Jumlah Kader Mahasiswa Hindu Yang Berkualitas”. Penjelasan atas misi ini, banyak berada di pembahasan sebelumnya dalam ruang lingkup bahasan “Ideologi KMHDI”.

Kesalahan yang selama ini sering terjadi dalam tubuh KMHDI adalah dilakukannya pemisahan kalimat misi KMHDI yang seharusnya berbunyi “Memperbesar Jumlah Kader Mahasiswa Hindu Yang Berkualitas”, yang secara tidak benar dibaca secara terpisah, sehingga menjadi dua pengertian yaitu (1) Pada titik ekstrem yang satu, “Hanya memperbesar jumlah kader KMHDI” dan (2) Pada titik ekstrem yang lain “Hanya mengembangkan kader KMHDI yang berkualitas”.

Kalimat Misi KMHDI harus dibaca sebagai sebuah kesatuan, yang berarti hanya ada satu pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam misi KMHDI yaitu “Memperbesar Jumlah Kader Mahasiswa Hindu Yang Berkualitas”, berarti sekaligus mengembangkan kuantitas kader dan kualitas kader. Apabila pertanyaan dikembangkan, kualitas seperti apa yang diinginkan oleh KMHDI ?, jawaban atas pertanyaan ini adalah pernyataan berikut :

Dalam terminologi KMHDI, Kader Mahasiswa Hindu Indonesia yang berkualitas tersebut adalah suatu sosok kader KMHDI yang religius, humanis, nasionalis dan progresif yang bersedia berjuang di jalan Hindu untuk mewujudkan kebebasan, keadilan dan solidaritas bagi semua individu yang berada dalam suatu negara yang berasaskan demokrasi dan hukum

3. STRUKTUR DAN MANAJEMEN ORGANISASI KMHDI

(Revisi berdasarkan Hasil Mahasabha V di Bandung, April 2006)

I. PENDAHULUAN

Memahami sebuah struktur dan manajemen suatu organisasi pada akhirnya akan masuk kepada teori-teori manajemen yang pernah disampaikan oleh pakar-pakar terhadap masalah ini baik secara sengaja ataupun tidak. Kalau dicoba untuk mengamati lebih jauh, barangkali sampai sekarangpun belum pernah ditulis bahkan disepakati dalam bentuk lisan definisi yang universal tentang manajemen organisasi.

Dari sekian banyak definisi yang tersampaikan ke-public, ada hal yang menjadi suatu titik berat bersama yaitu seperti apa yang disampaikan oleh Dexter Kimball & Dexter Kimball, Jr di dalam bukunya *Principles of Industrial Organization* yang antara lain mengatakan “ *Organisasi merupakan bantuan bagi manajemen. Ini mencakup kewajiban-kewajiban merancang satuan-satuan organisasi dan pengurus yang akan melakukan pekerjaan, menentukan fungsi-fungsi mereka dan merinci hubungan-hubungan yang harus ada di antara satuan-satuan dan orang-orang. Organisasi sebagai suatu aktivitas, sesungguhnya adalah cara kerja manajemen*”.

Berangkat dari pemahaman ini maka disusun sebuah stuktur organisasi dengan diikuti oleh manajemen organisasi sesuai dengan bentuk yang dianut oleh orang-orang didalamnya.

II. STRUKTUR ORGANISASI

Pimpinan Pusat KMHDI, Pimpinan Daerah KMHDI ataupun Pimpinan Cabang KMHDI adalah sebuah struktur kelembagaan organisasi yang berperan pada fungsi koordinasi, konseptual, dan operasional. Fungsi tersebut dirumuskan berdasarkan atas situasi dan kondisi riil umat, masyarakat, kampus di tingkat pusat, daerah atau cabang. Sebagai organisasi yang memiliki hirarki kepengurusan, maka dalam menjalankan fungsi-fungsi yang ada, dituntun oleh dengan rambu-rambu komunikasi, yaitu: garis instruksi dan garis koordinasi.

3.1 Garis Instruksi

Adalah menunjukkan hubungan kerja dengan pola perintah atau instruksi yang disampaikan dari pimpinan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai mekanisme yang berlaku. Adapun penggunaan garis instruksi adalah sebagai berikut :

1. Garis Instruksi terdapat pada struktur organisasi dimana terdapat tingkatan atau susunan yang didalamnya terdapat hubungan pimpinan dengan bawahan.
2. Garis Instruksi juga menunjukkan mekanisme pertanggungjawaban dari bawahan kepada pimpinan.
3. Garis Instruksi ditandai dengan suatu garis lurus yang utuh dengan pimpinan dan bawahan sebagai titik pangkal.

3.2 Garis Koordinasi

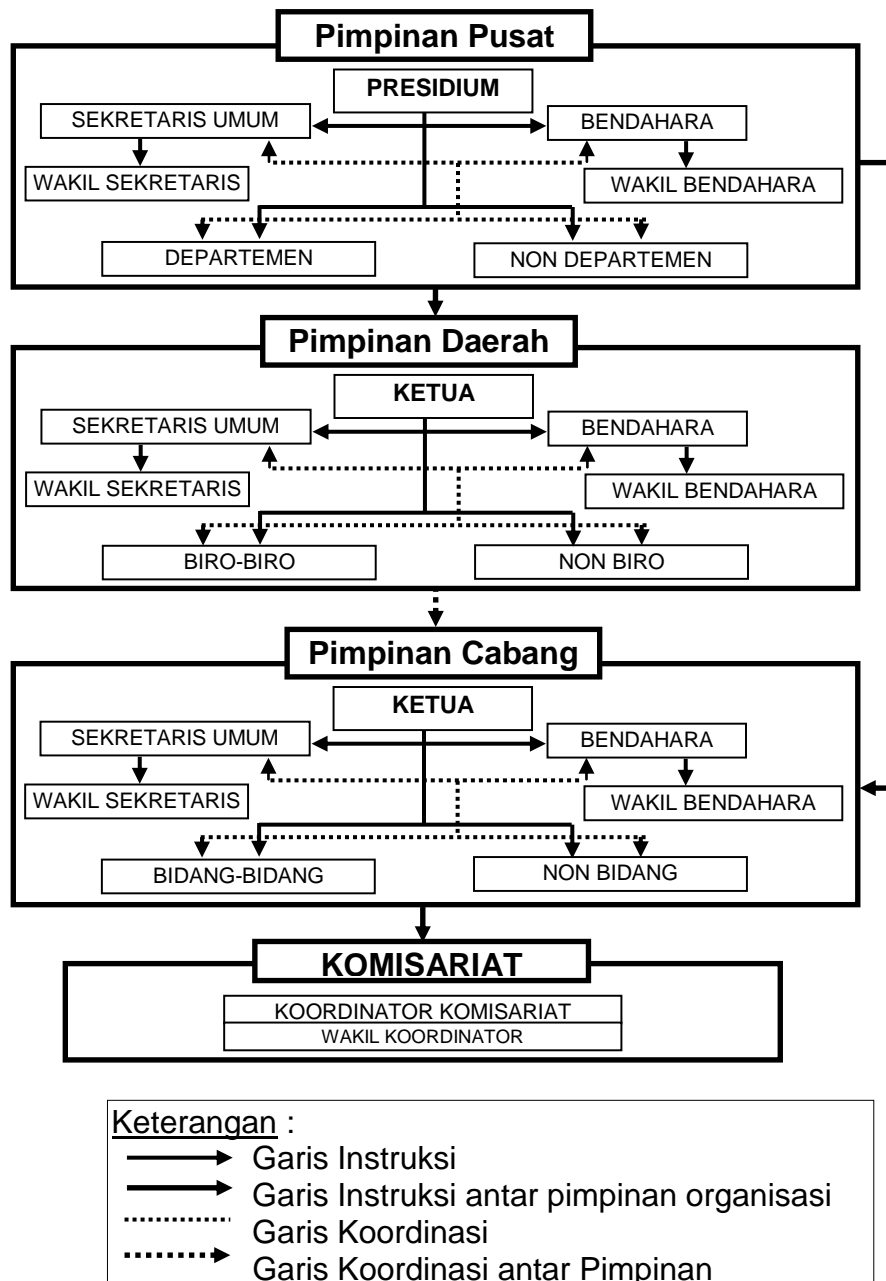
Adalah garis kerja yang diterjemahkan sebagai hubungan kerjasama atau koordinasi antar beberapa badan yang posisinya sama atau sejajar. Hubungan koordinasi dapat dilakukan antar lembaga atau badan atau pengurus dalam suatu struktur maupun antar struktur organisasi pada semua tingkatan yang sifatnya otonom. Adapun penggunaan garis koordinasi adalah :

1. Garis Koordinasi terdapat pada semua tingkatan organisasi yang didalamnya terdapat hubungan antar fungsionaris yang kedudukannya sejajar atau antar tingkatan organisasi yang bersifat otonom, dimana hubungan antara atasan dan bawahan yang bersifat instruksi hanya berkaitan dengan program kerja.
2. Dalam Garis Koordinasi tidak terdapat mekanisme atau hubungan pertanggungjawaban. Yang ada hanyalah mekanisme komunikasi dua arah.
3. Garis Koordinasi ditandai dengan garis putus-putus yang dapat menghubungkan antara fungsionaris dalam satu tingkatan atau antar tingkatan organisasi.

3.3 HIRARKI ORGANISASI KMHDI

Hirarki Organisasi KMHDI adalah susunan tingkatan kelembagaan KMHDI dari tingkat teratas sampai dengan tingkat terbawah. Didalamnya juga dijelaskan gambaran-gambaran umum berdasarkan bagan yang terbentuk. Dalam Organisasi KMHDI terdapat struktur organisasi sebagaimana yang tergambar dalam Bagan Organisasi, serta alur instruksi dan koordinasi sebagaimana yang tergambar dalam Garis Instruksi dan Garis Koordinasi. Hal ini diperlukan dengan maksud agar mekanisme kerja dan alur pertanggungjawaban organisasi dapat berjalan dengan lancar. Bagan struktur, alur instruksi dan koordinasi digambarkan melalui gambar Bagan Organisasi.

3.3.1 Bagan Hirarki Organisasi *



*) Hasil Mahasabha V KMHDI thn 2006

3.3.2 Diskripsi Bagan Hirarki Organisasi

Berdasarkan gambaran Bagan Hirarki diatas, dapat dilihat hubungan antara pimpinan /tingkatan organisasi KMHDI. Secara garis besar, bagan Hirarki KMHDI juga menggambarkan hubungan-hubungan yang terjadi dalam 1 (satu) tingkatan organisasi. Adapun diskripsi dari bagan hirarki organisasi KMHDI tersebut adalah:

1. Antara Pimpinan Pusat dengan Pimpinan Daerah

- Hubungan yang dilakukan menggunakan **Garis Instruksi dan Garis Koordinasi** (tidak ada dalam Tap Mahasabha) sehingga hubungan yang terjadi adalah

- hubungan yang bersifat **instruktif dan koordinatif** dari Pimpinan Pusat kepada Pimpinan Daerah. ----- **Lihat Anggaran Dasar Bab VIII ttg Struktur Organisasi**
- b. Hubungan dalam hal **Garis Instruksi** adalah bersifat khusus untuk kebijakan Organisasi yang bersifat **Internal Keorganisasian**.
 - c. Hubungan dalam hal **Garis koordinasi** adalah bersifat khusus untuk kebijakan Organisasi yang bersifat **eksternal Keorganisasian**.
 - d. **Hubungan koordinasi** secara formal keorganisasian antara Pimpinan Pusat dengan Pimpinan Daerah dapat terlaksana apabila diwakili atau diketahui oleh Presidium Pimpinan Pusat dan Ketua Pimpinan Daerah.
2. Antara Pimpinan Pusat dengan Pimpinan Cabang
 - a. Hubungan yang dilakukan menggunakan **Garis Instruksi dan Garis Koordinasi** sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat instruktif dan koordinatif dari Pimpinan Pusat kepada Pimpinan Cabang.
 - b. Hubungan dalam hal **Garis Instruksi** adalah bersifat khusus untuk kebijakan Organisasi yang bersifat **Internal Keorganisasian**.
 - c. Hubungan dalam hal **Garis koordinasi** adalah bersifat khusus untuk kebijakan Organisasi yang bersifat **eksternal Keorganisasian**.
 - d. Apabila dalam suatu daerah wilayah koordinasi organisasi (Propinsi) terdapat Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang, maka **hubungan koordinasi** secara formal keorganisasian antara Pimpinan Pusat dengan Pimpinan Cabang dapat dilaksanakan dengan mengadakan pemberitahuan kepada Pimpinan Daerah terlebih dahulu.
 - e. Hubungan koordinasi secara formal keorganisasian antara Pimpinan Pusat dengan Pimpinan Cabang dapat terlaksana apabila diwakili atau diketahui oleh Ketua Pimpinan Cabang.
 3. Antara Pimpinan Pusat dengan Pimpinan Komisariat

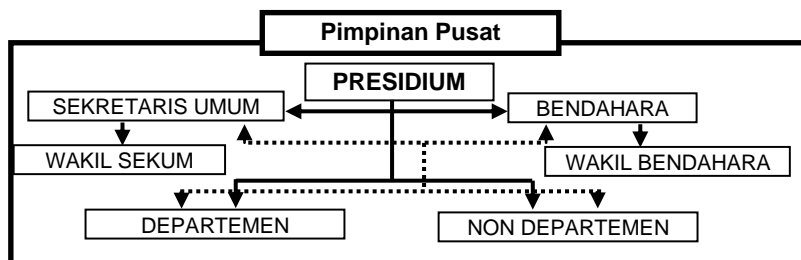
Hubungan yang dilaksanakan adalah **hubungan koordinasi** secara tidak langsung melalui Pimpinan Cabang.
 4. Antara Pimpinan Daerah dengan Pimpinan Cabang
 - a. Hubungan yang dilakukan menggunakan **Garis Koordinasi**, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat koordinatif.
 - b. Hubungan koordinasi secara formal keorganisasian antara Pimpinan Daerah dengan Pimpinan Cabang dapat terlaksana apabila diwakili atau diketahui oleh Ketua Pimpinan Daerah dan Ketua Pimpinan Cabang.
 5. Antara Pimpinan Daerah dengan Pimpinan Komisariat

Hubungan yang dilaksanakan adalah **hubungan koordinasi** secara tidak langsung melalui Pimpinan Cabang.
 6. Antara Pimpinan Cabang dengan Komisariat
 - a. Hubungan yang dilakukan menggunakan **Garis Instruksi**, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat instruktif dari Pimpinan Cabang kepada Komisariat, dimana Komisariat sebagai perpanjangan tangan Pimpinan Cabang secara langsung maupun tidak langsung melaksanakan program-program kerja cabang. Garis kerja yang digunakan adalah garis instruksi.
 - b. Hubungan instruksi secara formal keorganisasian antara Pimpinan Cabang dengan Komisariat dapat terlaksana apabila dilaksanakan atau diketahui oleh Ketua Pimpinan Cabang dan Koordinator Komisariat.

3.4 HIRARKI KEPENGURUSAN KMHDI

Hirarki Kepengurusan KMHDI adalah struktur organisasi dalam 1 (satu) tingkatan organisasi. Seperti halnya Hirarki Organisasi, gambar bagan dan diskripsinya relatif sama karena hirarki ini hanya detail yang menjelaskan masing-masing bagian. Adapun bagian-bagian yang dimaksud adalah Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Komisariat.

3.4.1 Pimpinan Pusat



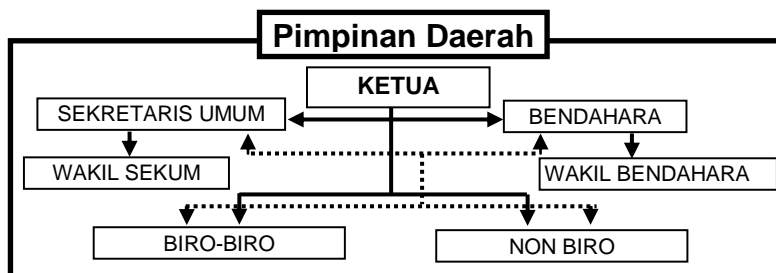
Gambar : Bagan Kepengurusan

Deskripsi

Adapun deskripsi dari Bagan Kepengurusan pada tingkat Pimpinan Pusat adalah:

1. Antara Presidium dengan Sekretaris Umum
Hubungan yang dilakukan menggunakan **Garis Instruksi**, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat instruktif dari Presidium ke Sekretaris Umum. Sehingga Sekretaris Umum akan bertanggungjawab langsung kepada Presidium.
2. Antara Presidium dengan Bendahara Umum
Hubungan yang dilakukan menggunakan **Garis Instruksi**, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat instruktif dari Presidium ke Bendahara Umum. Sehingga Bendahara Umum akan bertanggungjawab langsung kepada Presidium.
3. Antara Sekretaris Umum dengan Bendahara Umum
Hubungan yang dilakukan menggunakan **Garis Koordinasi**, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat koordinatif antara Sekretaris Umum dengan Bendahara Umum.
4. Antara Presidium dengan Departemen/Non Departemen
Hubungan yang dilakukan menggunakan **Garis Instruksi**, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat instruktif dari Presidium ke Departemen/Non Departemen. Sehingga Departemen dan Non Departemen akan bertanggungjawab langsung kepada Presidium.
5. Dan seterusnya mengikuti Garis Instruksi dan Garis Koordinasi yang ada.

3.4.2 Pimpinan Daerah



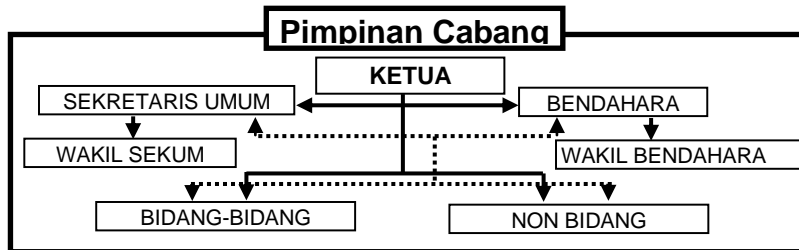
Gambar : Bagan Kepengurusan Pimpinan

Deskripsi

Adapun deskripsi dari Bagan Kepengurusan pada tingkat Pimpinan Daerah adalah:

1. Antara Ketua dengan Sekretaris
Hubungan yang dilakukan menggunakan **Garis Instruksi**, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat Instruktif dari Ketua ke Sekretaris. Sehingga Sekretaris akan bertanggungjawab langsung kepada Ketua.
2. Antara Ketua dengan Bendahara
Hubungan yang dilakukan menggunakan **Garis Instruksi**, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat Instruktif dari Ketua ke Bendahara. Sehingga Bendahara akan bertanggungjawab langsung kepada Ketua.
3. Antara Ketua dengan Wakil Ketua
Hubungan yang dilakukan menggunakan **Garis Instruksi**, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat instruktif dari Ketua ke Wakil Ketua. Sehingga Wakil Ketua akan bertanggungjawab langsung kepada Ketua.
4. Antara Sekretaris dengan Bendahara dan Wakil Ketua
Hubungan yang dilakukan menggunakan **Garis Koordinasi**, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat Koordinatif antara Sekretaris dengan Bendahara.
5. Antara Ketua dengan Biro/Non Biro
Hubungan yang dilakukan menggunakan **Garis Instruksi**, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat Instruktif dari Ketua ke Biro dan Non Biro. Sehingga Biro dan Non Biro akan bertanggungjawab langsung kepada Ketua.
6. Dan seterusnya mengikuti Garis Instruksi dan Garis Koordinasi yang ada.

3.4.3 Pimpinan Cabang



Gambar : Bagan Kepengurusan Pimpinan

Deskripsi

Adapun diskripsi dari Bagan Kepengurusan pada tingkat Pimpinan Cabang adalah:

1. Antara Ketua dengan Sekretaris
Hubungan yang dilakukan menggunakan **Garis Instruksi**, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat Instruktif dari Ketua ke Sekretaris. Sehingga Sekretaris akan bertanggungjawab langsung kepada Ketua.
2. Antara Ketua dengan Bendahara
Hubungan yang dilakukan menggunakan **Garis Instruksi**, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat Instruktif dari Ketua ke Bendahara. Sehingga Bendahara akan bertanggungjawab langsung kepada Ketua.
3. Antara Ketua dengan Wakil Ketua
Hubungan yang dilakukan menggunakan **Garis Instruksi**, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat instruktif dari Ketua ke Wakil Ketua. Sehingga Wakil Ketua akan bertanggungjawab langsung kepada Ketua.
4. Antara Sekretaris dengan Bendahara dan Wakil Ketua

Hubungan yang dilakukan menggunakan **Garis Koordinasi**, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat Koordinatif antara Sekretaris dengan Bendahara.

5. Antara Ketua dengan Bidang/Non Bidang
Hubungan yang dilakukan menggunakan **Garis Instruksi**, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat Instruktif dari Ketua ke Bidang/Non Bidang dan Koordinator Komisariat. Sehingga Bidang/Non Bidang dan Koordinator Komisariat akan bertanggung-jawab langsung kepada Ketua.
6. Dan seterusnya mengikuti Garis Instruksi dan Garis Koordinasi yang ada

3.4.4 Komisariat



Gambar : Bagan Kepengurusan

Deskripsi

Adapun deskripsi dari Bagan Kepengurusan pada tingkat Komisariat adalah:

1. Antara Koordinator dengan Wakil Koordinator
Hubungan yang dilakukan menggunakan **Garis instruksi** sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat **instruktif** antara antara **Koordinator dengan Wakil Koordinator**
2. Koordinator Komisariat bertanggungjawab langsung kepada Ketua Pimpinan Cabang KMHDI atau Ketua Pimpinan Daerah KMHDI, dan dapat diwakili oleh Wakil Koordinator jika Koordinator berhalangan tetap ataupun tidak tetap.
3. Dan seterusnya mengikuti Garis Instruksi dan Garis Koordinasi yang ada.

3.4.5 SYARAT PEMBENTUKAN PD dan PC serta KOMISARIAT KMHDI

Untuk memudahkan koordinasi anggota, PC KMHDI atau PD KMHDI yang tidak memiliki Pimpinan Cabang, dapat membentuk komisariat. Pembentukan ini disesuaikan kebutuhan taktis dan strategis organisasi berdasarkan pertimbangan wilayah. Sesuai dengan TAP. MAHASABHA V tahun 2006 yaitu BAB IV Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga KMHDI dalam memperluas dan mempererat jaringan mahasiswa Hindu Indonesia, KMHDI dapat melakukan pembentukan PD atau PC yang baru. Persetujuan untuk melakukan pembentukan PD atau PC ini ditentukan sepenuhnya oleh PP KMHDI. Dalam teknis pelaksanaannya, PP KMHDI dapat menunjuk PD atau PC KMHDI untuk melakukan tugas pembentukan tersebut. Khusus mengenai pembentukan PD KMHDI yang baru, hal tersebut dapat dilakukan apabila dalam suatu wilayah propinsi telah terdapat sedikitnya dua PC KMHDI.

MANAJEMEN ORGANISASI

Pada bagian ini menekankan pada manajemen dari struktur organisasi diatas dengan tetap melihat prinsip-prinsip sebuah organisasi yang terdiri dari : perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengangkatan (staffing), pengawasan (controlling) dan evaluasi (evaluating).

2.1. Di tingkat Pimpinan Pusat KMHDI

- ☞ Menyelenggarakan **Mahasabha** (terdapat wewenang untuk perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengangkatan (staffing), pengawasan (controlling) dan evaluasi (evaluating)).

- ☞ Menyelenggarakan **Rakernas** (terdapat wewenang untuk perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing).
- ☞ Menyelenggarakan **Rakornas** (terdapat wewenang untuk perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing) dan evaluasi (evaluating)).
- ☞ Menyelenggarakan **Rapimnas** (terdapat wewenang untuk perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengangkatan (staffing), pengawasan (controlling) dan evaluasi (evaluating) yang sifatnya strategis).

2.2. Pada Pimpinan Daerah

- ☞ Menyelenggarakan **Lokasabha** (terdapat wewenang untuk perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengangkatan (staffing), pengawasan (controlling) dan evaluasi (evaluating)).
- ☞ Menyelenggarakan **Rakerda** (terdapat wewenang untuk perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing).
- ☞ Menyelenggarakan **Rakorda** (terdapat wewenang untuk perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing) dan evaluasi (evaluating)).
- ☞ Menyelenggarakan **Rapimda** (terdapat wewenang untuk perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengangkatan (staffing), pengawasan (controlling) dan evaluasi (evaluating) yang sifatnya strategis).

3.3. Pada Pimpinan Cabang

- ☞ Menyelenggarakan **Sabha** (terdapat wewenang untuk perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengangkatan (staffing), pengawasan (controlling) dan evaluasi (evaluating)).
- ☞ Menyelenggarakan **Rakercab** (terdapat wewenang untuk perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing).
- ☞ Menyelenggarakan **Rakorcab** (terdapat wewenang untuk perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing) dan evaluasi (evaluating)).
- ☞ Menyelenggarakan **Rapimcab** (terdapat wewenang untuk perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengangkatan (staffing), pengawasan (controlling) dan evaluasi (evaluating) yang sifatnya strategis).

PENUTUP

Pengenalan singkat terhadap struktur dan manajemen organisasi KMHDI ini, disadari bahwa masih banyak hal lain yang belum dibahas. Namun demikian, dapat diketahui bahwa fungsi-fungsi manajemen apapun pasti memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Untuk itu kesamarataan dan kebersamaan menjadi penting bagi sebuah organisasi sosial kemasyarakatan. Fenomena seperti ini, seharusnya mampu disikapi secara bijaksana oleh segenap fungsionaris/pimpinan organisasi baik kapan saja, dan dimana saja wadah/kelompok/organisasi tersebut diorganisir.

Terkait dengan filosofi tadi, keterlibatan aktif anggota sebuah organisasi akan lebih memungkinkan untuk menjalankan setiap fungsi manajemen yang ada, sekaligus merupakan "perkenalan" terhadap organisasi dan menjadikannya sebagai ajang pertemanan, yang selanjutnya akan memunculkan rasa memiliki. Akhirnya, kegagalan atau suksesnya sebuah organisasi sangat tergantung dari kemauan dan kemampuan fungsionaris/pemimpin bersama dengan anggota-nya untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen secara efektif dan efisien.

Satyam Eva Jayate !!!

4. HUBUNGAN KMHDI DENGAN ORGANISASI LAIN

DASAR PEMIKIRAN

Sebagai sebuah organisasi yang berada ditengah-tengah masyarakat, adalah sebuah keharusan bagi KMHDI untuk mempunyai hubungan kelembagaan yang luas dengan berbagai pihak. Tata hubungan ini merupakan urat nadi yang memungkinkan KMHDI mengetahui apa yang terjadi dan secara aktif berperan sesuai jati dirinya untuk membangun diri, dan masyarakat, bangsa dan negara. Berbagai hubungan kelembagaan yang terjalin harus ditempatkan sesuai dengan independensi KMHDI. Sebagai wujud kenetralan serta independensi, maka KMHDI tidak berjalan dalam koridor politik praktis, melainkan menitikberatkan pada penyadaran partisipasi umat dan masyarakat. Secara umum bentuk hubungan kelembagaan akan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu yang bersifat internal (keumatan) serta hubungan eksternal (non keumatan termasuk Pemerintah). Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Bab VIII Pasal 28 dan 29 tentang Hubungan Kelembagaan, KMHDI dapat menjalin hubungan dengan lembaga pemerintah baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hubungan kelembagaan dapat dilakukan oleh setiap tingkatan organisasi KMHDI baik secara individu maupun secara lembaga. Hubungan dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang terjalin haruslah tidak bertentangan dengan AD/ART, GBHO, serta ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan organisasi KMHDI.

4.2 KMHDI DENGAN INDIVIDU

Hubungan KMHDI dengan perseorangan/individu merupakan bentuk dari hubungan sosial kemasyarakatan. Nilai yang diutamakan adalah solidaritas sebagai warga negara demi kepentingan bersama yang saling menguntungkan.

4.3 KMHDI DENGAN ORGANISASI HINDU

Hubungan ini didasarkan persamaan kepentingan keumatan yang dimiliki. Persamaan yang dimiliki merupakan modal yang utama dalam memberdayakan umat. Hubungan kelembagaan yang dimiliki antara lain dengan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), PERADAH, PRAJANITI, dsbnya. Disamping memiliki hubungan lembaga keumatan, KMHDI juga harus membina hubungan sosial dengan Asrama Mahasiswa Bali yang tersebar di berbagai propinsi. Hubungan lainnya adalah dengan menjalin hubungan strategis dengan Unit Kegiatan Kerohanian Hindu diberbagai Universitas. Pada akhirnya semua hubungan Internal ini merupakan sebuah modal bagi KMHDI untuk bersama-sama individu, dan lembaga di masyarakat membangun mahasiswa/masyarakat Hindu yang berkualitas.

4.4 KMHDI DENGAN ORGANISASI NON HINDU

Dalam memperjuangkan aspirasi umat berlandaskan kebangsaan, KMHDI harus aktif membangun hubungan dengan organisasi massa dan juga Pemerintah. Organisasi massa yang dimaksudkan antara lain; Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), serta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Hubungan ini dilatarbelakangi oleh keinginan yang sama untuk menciptakan Keadilan, Kebebasan, dan Solidaritas di dalam kehidupan plural bangsa.

4.5 KMHDI DENGAN PEMERINTAH

Dalam hubungannya dengan Pemerintah, KMHDI menempatkan diri sebagai gerakan moral, yang secara aktif menyumbangkan pemikirannya dalam kerangka kebangsaan.

4.6 PEMBENTUKAN FORUM DAN HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI

Suatu Forum dapat diikuti atau dibentuk oleh KMHDI dengan syarat :

- Memiliki Visi dan Misi yang tidak bertentangan dengan KMHDI.
- Tema dan kegiatan dari Forum yang bersangkutan tidak membahayakan Organisasi dan personal KMHDI.
- Kegiatan dari Forum yang dibentuk tidak melakukan politik praktis.

KMHDI dapat keluar dari suatu Forum, tanpa sebuah tekanan, apabila :

- Visi dan Misi pembentukan Forum sudah menyimpang dari kesepakatan semula.
- Merugikan Organisasi dan pribadi anggota.
- Membahayakan Organisasi dan pribadi anggota

5. Model Berpikir dan Penggunaannya

Disusun oleh : Made Surya Putra, Ketua Departemen Litbang PP KMHDI 1999-2002

Sesi model berpikir ini dilaksanakan untuk melatih kader-kader baru KMHDI mengerti, mampu menganalisa dan terlibat untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi pada umat Hindu dan bangsa Indonesia. Namun untuk dapat melakukan suatu pembedahan atas suatu masalah, seorang kader KMHDI harus dibekali terlebih dahulu dengan suatu alat untuk melakukan studi kasus tersebut.

Dalam ilmu pengetahuan modern, metode ilmiah diakui sebagai satu-satunya metode yang sah dalam melakukan pembedahan masalah. Karena itu pada sesi ini, sebelum melakukan studi kasus, para kader baru terlebih dahulu akan diingatkan kembali pada metode ilmiah. Selain metode ilmiah, para kader baru juga harus diajarkan suatu alat analisa lain, yang umum dikenal dengan nama model berpikir. Pembahasan mengenai model berpikir, mencakup tentang cara mengerti, cara menguraikan, cara menganalisa, dan cara-cara pemecahan suatu persoalan. Pembahasan pada sesi ini akan dimulai dengan metode ilmiah.

1. Metode Ilmiah

Seluruh gerak sadar badan dan emosi seorang manusia, dipengaruhi oleh yang disebut dengan pola pikir. Dalam prakteknya, pola pikir itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat intelektual seseorang serta alat analisa yang digunakan. Dalam perbincangan mengenai analisa masalah dalam ilmu pengetahuan modern, terlebih dahulu seseorang harus mengetahui, mengerti dan mempraktekkan metode ilmiah dalam kehidupannya. Metode ilmiah penting karena inilah satu-satunya jalan yang secara umum dianggap sah dalam proses pemecahan suatu masalah secara ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah meliputi perumusan masalah, pengumpulan informasi yang relevan, pembuatan hipotesis, pengujian/pembuktian hipotesis, pembuatan kesimpulan sementara, pengujian/pembuktian akhir, dan kesimpulan akhir.

Seorang individu yang ilmiah, tidak boleh melangkahi satupun proses tersebut, karena kesimpulan akhir yang muncul tanpa melalui proses ini akan memiliki kelemahan logika secara mendasar. Kelengkapan alat analisa ini juga harus ditunjang oleh beberapa faktor lain. Secara umum ada tiga hal yang secara signifikan mempengaruhi pola berpikir seseorang yaitu, bahan bacaan, diskusi dan pengalaman.

Dalam studi kasus nantinya, diharapkan agar para kader mampu menggunakan metode ilmiah dalam melakukan penelaahan permasalahan, yang ditunjang dengan informasi yang diperoleh dari bahan bacaan, diskusi dan pengalaman.

2. Model Berpikir

Dalam prakteknya proses berpikir dengan metode ilmiah harus ditunjang dengan suatu model berpikir yang benar. Model berpikir dapat dianalogikan sebagai sebuah pisau bedah bagi seorang dokter ahli bedah. Tanpa pisau tersebut seorang ahli bedah tidak akan mampu melakukan pembedahan secara sempurna. Mungkin si ahli bedah dapat menggunakan alat lain, namun hasil pembedahannya tidak akan sempurna. Definisi model berpikir adalah "Suatu alat analisa permasalahan yang berbasiskan logika dan informasi". Karena pola pikir berbasiskan logika, maka masalah yang dapat dibahas oleh model berpikir adalah masalah-masalah yang logis dan rasional yang berada pada dimensi ruang dan waktu serta pemikiran filosofis yang berdasarkan logika. Sedangkan informasi penting sebagai penunjang utama proses berpikir.

Kenapa model berpikir diajarkan dalam kaderisasi KMHDI ? Ini semata-mata karena kemampuan analisa seseorang akan sangat menentukan kemampuan seseorang tersebut dalam melakukan pemecahan masalah. Dalam model berpikir, yang dilatih adalah penalaran dengan berbasiskan pada informasi yang telah dimiliki sebelumnya. Untuk lebih memperjelas pentingnya model berpikir, berikut ini akan dikemukakan dua contoh kasus

Contoh 1 : Kasus

Di sebuah *Elementary School* di Australia, diajarkan bahasa Indonesia. Salah satu sub bahasanya adalah cara membilang dari satu hingga sepuluh. Ini diajarkan pada beberapa anak-anak keturunan Australia yang tidak dapat berbahasa Indonesia, namun telah dapat melakukan perhitungan dalam bahasa Inggris.

Mula-mula sang guru mengajarkan hitungan dari satu hingga sepuluh dalam bahasa Indonesia, yaitu satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Setelah setiap anak menguasai hitungan tersebut (dalam bahasa Indonesia), maka kemudian sang guru menanyakan apa bahasa Indonesianya 46. Beberapa anak menjawab bahwa pertanyaan itu tidak adil, karena belum pernah diajarkan. Namun seorang anak yang lain menjawab bahwa bahasa Indonesia untuk 46 adalah “empat sepuluh enam”. Disini terlihat bahwa anak yang menjawab “empat sepuluh enam” telah menggunakan penalarannya dalam melakukan pemecahan masalah. Mungkin bahasanya salah, namun logikanya benar. Dalam kasus ini, anak yang pertama (yang mengatakan bahwa pertanyaan yang diajukan tidak adil) dikatakan baru sampai pada tahap “reproduksi” atau “pengulangan”, dimana ia belum mampu membangkitkan pengetahuan baru dari informasi yang telah dimilikinya. Sedangkan anak yang kedua (yang menjawab “empat sepuluh enam”) telah sampai pada tahap “pembangkitan”, dimana dengan penguasaan pada pengetahuan yang dimilikinya secara umum, dia mampu menghasilkan pengetahuan baru.

Contoh 2 : Teka-teki

Si A adalah seorang pemulung, yang dalam waktu luangnya mengumpulkan puntung rokok untuk dibentuk ulang menjadi rokok baru dan dikonsumsi sendiri. Pada suatu hari si A berhasil mengumpulkan 49 (empat puluh sembilan) puntung rokok. Apabila dari setiap 7 (tujuh) puntung rokok yang dikumpulkannya, dia bisa membuat satu rokok baru. Berapakah rokok baru yang berhasil dibuat oleh si A ?

Tujuan dari diajarkannya model berpikir dalam kaderisasi KMHDI adalah, mengacu pada kasus dan teka-teki diatas, seharusnya membuat peserta didik berada pada model “pembangkitan”.

Model berpikir dapat dibagi dalam dua model besar yaitu model berpikir yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang bersifat parsial dan model berpikir yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang bersifat perbandingan. Sesuai dengan urutannya, model berpikir yang melakukan analisa atas permasalahan parsial harus terlebih dahulu dikuasai, sebelum mempelajari model berpikir perbandingan.

Khusus pada sesi MPAB, model berpikir yang diajarkan adalah model berpikir substansial karena berpikir substansial adalah model berpikir yang menjadi dasar dari semua model berpikir yang lain. Penguasaan model ini harus dikuasai dengan baik sebelum melangkah dengan model yang lain. Untuk model berpikir yang lain akan diajarkan pada tahapan kaderisasi berikutnya.

3. Berpikir Substansial

Yang dimaksud dengan berpikir substansial adalah sebuah proses berpikir yang menekankan pembahasan permasalahan pada substansi (dasar) dari masalah yang dibahas. Cara berpikir ini digunakan untuk membahas suatu masalah yang bersifat parsial. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah.

- a. Melakukan perumusan masalah
- b. Membedah masalah dengan model pohon tunjang (menentukan variabel-variabel dasar yang menjadi pembentuk masalah)
- c. Setelah variabel dasar ditemukan, maka dibuat substansi Variabel
- d. Setelah substansi variabel ditemukan, maka dibuat standar penilaian masing-masing substansi variabel
- e. Melakukan penilaian terhadap substansi variabel
- f. Menjawab permasalahan

Modul MPAB

| No | Materi | Wkt | Penyajian | Fokus Penyampaian | Tujuan |
|----------|--|---------|-----------------------------|---|--|
| 1 | Pengenalan Organisasi KMHDI | | | | Kader mengetahui dasar-dasar organisasi dan mampu menjelaskan pada pihak diluar organisasi |
| | a. Sejarah KMHDI | 30 mnt | Monolog | Fokus pada nilai-nilai pembentukan KMHDI dan perkembangan KMHDI di tingkat nasional, daerah atau cabang | Kader mengetahui tujuan awal dibentuknya KMHDI dan perkembangan dari tahun ketahun |
| | b. Penjelasan Purwaka AD/ART KMHDI | 120 mnt | Monolog dan dialog mendalam | Fokus pada pembahasan mengenai negara, hukum, demokrasi, 3 azas, 4 jati diri anggota serta visi dan misi KMHDI | Kader mengetahui cara pandang dasar KMHDI mengenai hal-hal yang paling mendasar, dalam hubungannya dengan segala sisi kehidupan seorang kader di dalam dan diluar organisasi |
| | c. Struktur dan Manajemen KMHDI | 30 mnt | Monolog | Fokus pada Buku Pedoman organisasi | Kader mengetahui hubungan koordinasi dan garis perintah di dalam sebuah sistem kepengurusan lokal maupun bertingkat secara nasional |
| | d. Hubungan KMHDI dengan organisasi lain | 30 mnt | Monolog, contoh kasus | Fokus pada bentuk hubungan, keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul | Kader mengetahui posisi KMHDI diantara organisasi Mahasiswa, organisasi bernuansa Hindu dan dengan organisasi lainnya |
| | e. Peran KMHDI untuk Umat | 30 mnt | Monolog, contoh kasus | Fokus pada tindakan praktis yang telah dilakukan | Kader mengetahui jenis kegiatan ideal yang seharusnya dilaksanakan oleh KMHDI dalam pemberdayaan umat dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KMHDI wilayah lokal |
| 2 | Weda dan Panca Sradha | | | | |
| | a. Weda dan Panca Sradha | 60 mnt | Monolog | Fokus pada Konsep dasar Weda dan Panca Sradha | Kader mengetahui konsep dasar dari Weda dan Panca Sradha |
| | b. Diskusi praktek keagamaan lokal | 60 mnt | Dialog mendalam | Fokus pada analisis kritis konsep ideal dan praktek atau penyimpangan di lapangan | Kader mampu mengerti dan menganalisis secara kritis praktek keagamaan lokal yang terjadi dan mengerti tentang proses sejarah dan dialektika-nya |
| 3 | Berpikir Substansial dan Penerapannya | | | | |
| | Berpikir Substansial | 60 mnt | Monolog | Fokus pada pengertian dasar berpikir substansial | Kader mengetahui apa yang dimaksud dengan berpikir substansial dan mampu menerapkan pada kasus-kasus yang riil terjadi di masyarakat. |
| | Contoh kasus, dialog | 90 mnt | Dialog | Fokus pada dialog dan memberi kesempatan penuh serta mendorong calon kader untuk mengungkapkan pikirannya dalam melakukan analisa kasus | |
| 4 | Muatan Lokal | | | Otonomi Daerah atau Cabang | |

Lembaran Evaluasi MPAB (Dibagikan pada peserta)

Hari / Tgl Pelatihan :
Topik Bahasan :
Nama Pelatih :

Keterangan

1. Isilah lembar evaluasi dengan benar dan sesuai dengan pendapat saudara
2. Setelah diisi, segera diserahkan pada seksi acara panitia pelatihan
3. Berilah tanda silang pada angka disebelah kanan yang merupakan pilihan saudara dengan ketentuan sebagai berikut : Pilih (1) bila sangat kurang, (2) bila kurang, (3) bila sedang, (4) bila baik, (5) bila sangat baik.

| No | Unsur Penilaian | Nilai | | | | |
|-------------|--|-------|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penguasaan materi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Kesesuaian materi dengan Buku Pedoman Kaderisasi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Sistematika penyajian | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Penguasaan metode dan alat bantu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Kemampuan memotivasi peserta latihan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Kemampuan mentransfer pengetahuan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Bahasa, Sikap dan penampilan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Total Nilai | | | | | | |